

**PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program
Strata 1 (S.1)



Tsania Nafiza Azzahrani

2005046096

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Tsania Nafiza Azzahrani
NIM : 2005046096
Judul : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

15 Maret 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 20 Maret 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si
NIP. 198607312019031008

Penguji I

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP. 196908301994032003

Pembimbing I

Johan Arifin, S.Ag., MM
NIP. 197109082002121001

Sekretaris Sidang

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

Penguji II

Arif Afendi, S.E., M.Sc
NIP. 198505262015031002

Pembimbing II

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013



PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Tsania Nafiza Azzahrani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Tsania Nafiza Azzahrani

NIM : 2005046096

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 5 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Johan Arifin, M.Ag.
NIP.197109082002121001

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“ Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah:6-7)

“Setiap proses ada jalannya sendiri, prosesmu tidak sama dengan orang lain. Akan lebih lama atau lebih cepat, akan sulit atau mudah. Jangan berhenti untuk berusaha, hasilmu tidak akan mengkhianati usahamu. Nikmati semua jalannya dengan ikhlas dan bahagia.”

(Tsania Nafiza Azzahrani)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, saya persembahkan karya kecil ini sebagai bentuk terimakasih kepada orang-orang yang telah memberi dukungan, doa, motivasi demi kelancaran tugas akhir ini, terkhusus kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Rifa'i dan Ibu Sri Sugiarti yang selalu mendukung, mendoakan, dan mengajarkan banyak hal dalam menjalani kehidupan. Doa dan serta dukungan senantiasa kuharapkan agar langkah yang diajalani diberikan kemudahan.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Johan Arifin, S.Ag., MM dan Ibu Irma Istiariani, M.Si yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberi saran, arahan, bantuan dalam penulisan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh dosen yang telah memberi ilmu dan pengajaran kepada saya selama menjalani perkuliahan ini sampai selesai.
4. Kepada semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
5. Dan terakhir kepada diri saya sendiri Tsania Nafiza Azzahrani, yang telah berhasil sampai di titik ini dengan segala hal yang menyertai, baik dan buruknya terimakasih telah sampai penghujung perkuliahan.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak)” merupakan karya penulis yang sesungguhnya, tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan. Demikian deklarasi ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 16 Februari 2024

Deklarator,



Tsania Nafiza Azzahrani

NIM. 2005046096

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

◌َ - = a

◌ِ - = i

◌ُ - = u

C. Diftong

Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

أَيّ = ay

أَوّ = aw

D. Syaddah (◌ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ al-thibb

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* misalnya الصنّاعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

F. Ta, Marbutoh (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشن الطبيعي = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah studi kasus pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Demak. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangannya. Dari 18 Dinas Kab Demak 8 diantaranya belum membuat dan mengungkapkan LKJIP.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah pegawai SKPD Kabupaten Demak yang berbentuk Dinas. Jumlah responden pada penelitian ini ada 54 dengan rincian setiap SKPD diambil 3 pegawai. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan sampelnya. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan IMB SPSS 26 dengan analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat hipotesis diterima. Variabel sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan. Variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan. Variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan. Namun pada variabel kejelasan sasaran anggaran hasilnya adalah berpengaruh negatif signifikan, hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis yang ada. Namun secara simultan variabel sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Demak.

Kata kunci : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the reporting system, clarity of budget targets, internal control system, and the application of government accounting system on the accountability of government agency performance case study in the local government work unit of Demak Regency. Government Regulation No.8 of 2006 Article 2 states that in order to be accountable for the implementation of the APBN/APBD, each reporting entity is required to compile and present its performance reports and financial statements. Of the 18 Demak District Offices, 8 of them have not made and disclosed LKJIP.

This research is included in quantitative research. The population and sample of this study are employees of SKPD Demak Regency in the form of Dinas. The number of respondents in this study was 54 with details of each SKPD taken by 3 employees. This study used purposive sampling to determine the sample. Data processing in this study used IMB SPSS 26 with multiple linear regression analysis.

The results of this study showed that three out of four hypotheses were accepted. Reporting system variables have a significant positive effect. Internal control system variables have a positive and significant effect. The variable application of the local government accounting system has a positive and significant effect. However, on the variable of clarity of budget targets, the result is a significant negative effect, this is inversely proportional to the existing hypothesis. However, simultaneously the variables of the reporting system, clarity of budget targets, internal control system, and application of government accounting have a positive and significant effect on the accountability of the performance of Demak Regency government agencies.

Keywords: *Government Agency Performance Accountability, Reporting System, Clarity of Budget Targets, Internal Control System, Local Government Accounting System.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkah, rahmat serta hidayah-Nya. Maha Penyayang, atas kasih sayang serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhamma Saw, nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH** (Studi Kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) Program Studi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan hambatannya. Namun dengan doa, usaha, motivasi, semangat dan bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., CA., CPA selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Warno, S.E., M.Si selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.
5. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku dosen pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Irma Istiariani, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen, tenaga pendidik, dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan jenjang sarjana ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Rifa'i dan Ibu Sri Sugiarti yang

senantiasa memberikan dukungan, doa, motivasi untuk mendorong penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini.

9. Kepada keluarga besar Akuntansi Syariah 2020, khususnya AKSC yang telah memberi dukungan dan perjuangan bersama dalam proses penulis.
10. Keluarga besar KKN Reguler ke 80 terkhusus posko 7 Desa Tolokan kecamatan Getasan, Bapak Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si selaku DPL posko 7, Keluarga besar magang Relawan Pajak KPP Pratama Demak.
11. Dan kepada semua sahabat, teman, saudara penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu, untuk motivasi, doa, dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semarang, 16 Februari 2024

Penulis

Tsania Nafiza Azzahrani

NIM.2005046096

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI	V
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VI
ABSTRAK	VIII
<i>ABSTRACT</i>	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 <i>Agency Theory</i>	10
2.2 <i>Stewardship Theory</i>	11
2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	12
2.4 Sistem Pelaporan.....	15
2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran.....	18

2.6	Sistem Pengendalian Internal.....	21
2.7	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	23
2.8	Penelitian Terdahulu	26
2.9	Hipotesis Penelitian	30
2.10	Peta Konsep	34
BAB III.....		35
METODE PENELITIAN		35
3.1	Jenis dan Desain Penelitian	35
3.2	Jenis Dan Sumber Data.....	35
3.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	35
3.4	Variabel Penelitian.....	37
3.5	Metode Pengumpulan Data	39
3.6	Uji Instrumen.....	39
3.7	Uji Asumsi Klasik	40
3.8	Uji Hipotesis	41
BAB IV		43
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Gambaran Umum	43
4.2	Karakteristik Responden.....	46
4.3	Uji Instrumen.....	50
4.4	Uji asumsi Klasik.....	52
4.5	Uji Hipotesis	55
4.6	Pembahasan	60
BAB V.....		66
PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan.....	66
5.2	Keterbatasan	67
5.3	Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2022	5
Tabel 2.1 Bobot Penilaian Komponen Evaluasi AKIP	13
Tabel 2.2 Kategori Nilai dan Interpretasi Evaluasi AKIP	14
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Jumlah Sampel	37
Tabel 3.2 Variabel Penelitian	38
Tabel 3.3 Skor Jawaban	39
Tabel 4.1 Daftar SKPD Kabupaten Demak.....	45
Tabel 4.2 Daftar Responden.....	47
Tabel 4.3 Jenis Kelamin Responden	48
Tabel 4.4 Umur Responden.....	48
Tabel 4.5 Masa Jabatan Responden	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 4.8 Hasil Uji Sampel Kolmogorof-Smirnov	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikoloniearitas.....	53
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser.....	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda.....	55
Tabel 4.12 Hasil Koefisien.....	57
Tabel 4.13 Hasil Uji F.....	59
Tabel 4.14 Hasil Uji Determinan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	13
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian	34
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Demak	44
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner	77
Lampiran 1. 2 Surat izin Penelitian	81
Lampiran 1. 3 Bersama Responden.....	89
Lampiran 1. 4 Tabulasi Data Penelitian	90
Lampiran 1. 5 Hasil Pengujian	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Otonomi daerah adalah upaya daerah untuk membuat keputusan daerahnya secara mandiri guna mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, serta potensi daerahnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berisi penegasan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Daerah yang dapat mengelola keuangannya dengan baik bisa dikatakan mandiri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dalam ketiga UU tersebut menginginkan hasil berupa transparansi dan akuntabilitas dalam semua hal termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 1 ayat 3 dijelaskan laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangannya. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atau kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah terdapat pada daerah maupun pusat. Pengukuran ini dilakukan guna melihat kinerja pemerintahan dalam tahun berjalannya. Dalam akuntabilitas kinerja terdapat berbagai informasi yang dibutuhkan untuk sektor publik. Akuntabilitas publik merupakan sebuah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang sudah diamanahkan kepada pihak yang memberikan amanah untuk meminta pertanggungjawaban tersebut¹.

Saat ini akuntabilitas publik semakin diperlukan dan menjadi perhatian publik. Penyebabnya sendiri adalah kemajuan teknologi informasi dan globalisasi. Kemajuan teknologi informasi membuat pemerintah harus menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) dalam penanganan pelayanan publik. Semakin banyak kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan sektor publik, pemerintah diharapkan semakin meningkatkan pelayanan dan kinerjanya². Pemerintah daerah yang memiliki akses lebih terhadap sumber daya suatu daerah diharapkan dapat mengelola dengan baik, supaya hasilnya dapat mensejahterkan masyarakat.

Kegiatan perencanaan dan penganggaran harus melibatkan semua unsur pelaksana yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dimulai dari penentuan program kegiatan, belanja, penentuan standar biaya, penentuan indikator kinerja, target, sampai dengan jumlah anggaran yang disiapkan, perlu perhatian serius bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah beserta pelaksana program kegiatan³. Hal ini dilakukan supaya tujuan dan rencana dapat terlaksana dengan maksimal.

Sistem pelaporan merupakan bentuk tanggungjawab pelaporan dari bawahan ke atasan yang tujuannya memberikan informasi mengenai tindakan yang sudah diambil dalam penggunaan anggaran kepada pihak-pihak berkepentingan. Dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa komponen yang dianggap penting, termasuk perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah disetujui.

Diperlukan sistem pelaporan yang efisien untuk memonitor kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi lain yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan yang dianggap baik adalah laporan yang obyektif, transparan, layak, andal, mudah dipahami, menarik, lengkap, dan

¹ Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

² Rangkuti, M. H. B. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. 8(2), 93–101.

³ Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, VOL. 2 NO.*(Vol. 2 No. 4 (2017): Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja), 56–68.

sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan sektor publik sangat penting karena berkontribusi pada pembentukan akuntabilitas sektor publik.

Sistem pelaporan yang baik dari suatu instansi pemerintah akan menimbulkan dampak positif terhadap akuntabilitas kerjanya. Sistem pelaporan yang baik adalah laporan yang dibuat dengan jujur, transparan, objektif, dan harus sesuai dengan SAP. Dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah bisa mengetahui program-program ataupun capaian yang telah dilakukan, meninjau dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai dengan rencana guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas sesuai dengan porsinya. Hal ini agar anggaran dapat dipahami dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan anggaran tersebut. Anggaran yang telah disetujui oleh pemerintah harus mencerminkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh anggaran tersebut. Jika anggaran tidak jelas tujuannya, dapat menimbulkan masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran memiliki sasaran yang jelas. Dengan cara ini, anggaran dapat memberikan manfaat yang signifikan dan juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran di mata masyarakat.

Anggaran pemerintah daerah adalah komponen dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang harus mengarah pada akuntabilitas. Untuk mencapai tingkat kinerja yang memenuhi harapan masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran berperan penting dalam memengaruhi akuntabilitas kinerja. Ketidakjelasan anggaran membuat *inefisiensi* dan *efisiensi* anggaran menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat membuat aparat pemerintah daerah kesulitan dalam menetapkan target-target anggaran yang harus dicapai.

Sistem pengendalian internal diperlukan bagi instansi pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel bisa dicapai dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada semua kegiatan yang telah tertarget. Sehingga seluruh kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara terarah, tertip, efisien dan efektif. Adanya sistem pengendalian internal yang baik diharapkan memberi keyakinan memadai atas seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang baik dan efisien adalah salah kunci kesuksesan pelayanan operasional yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini sering disebut sistem pengendalian internal pemerintah, sistem ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem

pengendalian internal adalah proses terstruktur yang dilakukan pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada SAP jika para SKPD melakukan sesuai dengan panduan dan aturan maka akan menghasilkan *output* yang baik. Unsur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam penelitian ini adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika semua unsur tersebut dilakukan saat membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban maka akan menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari penerapan sistem akuntansi pemerintah ini agar semua SKPD tertib dalam administrasi dan pelaporan keuangannya. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Adanya sistem akuntansi pemerintah juga memungkinkan adanya kegiatan akuntansi yang selaras antara satu instansi satu dan lainnya, hal ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang bertindak sebagai konsolidator. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL/SAK, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan.

Kinerja pemerintah harus selalu diukur untuk mengetahui bagaimana pemerintah melakukan tanggungjawabnya. Dalam pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja non keuangan dapat dilihat dengan menilai sejauh mana pemerintah mencapai target yang sudah ditentukan sejak awal dan kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat laporan keuangannya disetiap akhir periode. Terwujudnya pemerintahan yang baik adalah harapan kita bersama. Pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan baik dari publik. Masyarakat akan menaruh kepercayaan atas apa yang direncanakan, diselenggarakan, diwujudkan oleh program pemerintah.

Kabupaten Demak adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di sebelah Barat Kota Semarang, letaknya pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ - $7^{\circ}09'43''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}27'58''$ - $110^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Memiliki 14 kecamatan yang membawahi 249 desa/kelurahan. Dari data BPS Kab demak tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Demak sebanyak 1.223.217 jiwa. Jarak terjauh dari Barat ke Timur sepanjang 49 km, sedangkan dari Utara ke Selatan terbentang sepanjang 41 km. Semua wilayah

kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum dengan mudah, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah.

Tabel 1.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2020-2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai		
			2020	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	21,46	21,62	22,08
2	Pengukuran Kinerja	25	15,49	15,99	19,41
3	Pelaporan Kinerja	15	10,97	11,39	11,42
4	Evaluasi Internal	10	5,8	6,06	16,06
5	Capaian Kinerja	20	11,23	11,34	
NILAI		100	64,95	66,4	68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B

Sumber : LKJIP Kab Demak Tahun 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja memang mengalami peningkatan. Tahun 2020 akuntabilitas kinerjanya 64,95, tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,45 dengan nilai akuntabilitas kinerjanya 66,4, dan di tahun 2020 nilainya 68,96. Secara umum realisasi Indikasi kinerja utama di Kabupaten Demak sudah baik tetapi belum mencapai target.

LKJIP Kabupaten Demak tahun 2022 diperoleh hasil dari pengukuran kinerja terhadap 3 tujuan daerah, 2 berpredikat sangat tinggi dan 1 berpredikat tinggi. Pengukuran 12 sasaran daerah dengan 10 sasaran daerah yang berpredikat sangat tinggi, 1 berpredikat sedang, dan 1 berpredikat rendah. Pengukuran 21 Indikator Kinerja Utama, 16 IKU berpredikat sangat tinggi dengan presentase 76,19%, 2 IKU berpredikat tinggi, 1 berpredikat sedang, 1 berpredikat rendah, dan 1 berpredikat sangat rendah.

Dari LKJIP Kabupaten Demak tahun 2022 masih terdapat beberapa capaian kinerja yang masih dibawah target dan rencana. Hasil pengukuran kinerja dari 12 sasaran daerah dengan menggunakan 16 indikator didapati 7 indikator yang efisien sedangkan 9 indikator belum efisien. Indikator yang belum efisien adalah Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Pengeluaran, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, LPE pada kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Tingkat Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Gini.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Demak yang belum membuat dan melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara maksimal, sehingga capaian kinerja Instansi Pemerintah secara keseluruhan belum

bisa dinilai efektif dan baik oleh masyarakat dan lembaga lebih tinggi. Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Demak berjumlah 42. Dalam penelitian ini akan digunakan 18 SKPD yang berbentuk dinas. Dari observasi yang telah dilakukan ditemukan hanya 10 dinas yang sudah membuat. Sedangkan 8 dinas yang belum ataupun tidak membuat LKJIP diantaranya adalah Dinas Perpustakaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tenaga Kerja. Dan 10 dinas yang sudah membuat LKJIP.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019) menemukan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian oleh Evada Dewata, Yuliana Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020) menemukan bahwa secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Devika Diah Precelina, Eni Wuryani (2019) menemukan bahwa Sistem pelaporan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian oleh Devika Diah Precelina, Eni Wuryani (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Zuraifa Nadila, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan (2021) juga menyatakan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada penelitian Helin Gustri Mulya dan Eka Fauzihard (2022) menunjukkan hasil variabel kepatuhan terhadap regulasi memperlemah pengaruh positif variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntansi pemerintah. Penelitian oleh Rio Pratama, Henri Agustin, dan Salma Taqwa (2019) menunjukkan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian oleh Ajhar, Akram, Endar Pituringsih (2015) menemukan bahwa tidak dapat membuktikan adanya pengaruh variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada penelitian Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2020) ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja akuntabilitas pemerintah.

Penelitian oleh Esha Selvia Ayu Sella, Maslichah, Dwiyani Sudaryani (2020) menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Dina Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021) menemukan bahwa secara simultan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah. Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pada penelitian terdahulu masih terdapat *inkonsistensi* pada penerapan hasil penelitiannya. Pembahasan mengenai variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah yang belum banyak dibahas. Pada penelitian ini akan dibahas pengaruh variabel sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, dan penerapan akuntansi pemerintah daerah. Penelitian ini akan menggabungkan 2 teori yaitu agency teori dan stewardship teori.

Dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah penting untuk melihat seberapa jauh pemerintah melakukan tanggungjawabnya merealisasikan setiap kegiatan dan anggaran yang disusun setiap tahunnya. Hal menarik yang dapat diperhatikan adalah capaian Kinerja Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Demak dinilai belum efektif dan baik oleh masyarakat serta lembaga yang lebih tinggi karena pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerahnya belum membuat dan melaporkan LKJIP. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti apa saja yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peneliti mengangkat judul **“Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Studi kasus pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak”**.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan berikut :

1. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah ?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah ?
4. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
2. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
3. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.
4. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Untuk penulis.
Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan yang lebih baik bagi penulis tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk akademik.
Penelitian ini diharapkan menambah dan mejadi salah satu referensi yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk instansi pemerintah dan lainnya.
Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan tambahan wawasan bagi instansi pemerintah dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja instansinya.
4. Untuk masyarakat atau publik.
Penelitian ini diharapkan menambah informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penulisan, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesisi dan kerangka berfikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi statistik data, metode analisis data. Dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan penelitian, keterbatasan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Agency theory dicetuskan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan adalah teori ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan agen. Agensi teori mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham serta manajemen. Hubungan antara pemilik dan manajer pada dasarnya sulit tercipta karena adanya kepentingan bertentangan. Menurut Jensen dan Smith (1984) agensi teori adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual *principal* dengan agen. *Principal* merupakan pihak yang memberi kewenangan kepada agen, untuk melakukan kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah teori yang mendasari hubungan antara *principal* dan agen.⁴

Agency theory adalah teori penggambaran hubungan agen dan prinsipal. Di dalam penelitian ini yang berlaku sebagai agen adalah pemerintah, sedangkan *principal* adalah masyarakat. Hubungan pemerintah dalam eksekutif bertindak sebagai agen, lalu masyarakat sebagai *principal* dalam *agency* teori ini akan terjadi asimetri informasi karena pemerintah memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan dengan masyarakat. Dalam hal ini akan menimbulkan permasalahan, maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Mengemukakan LAKIP sebagai salah satu upaya mengurangi permasalahan, karena masyarakat sebagai *principal* dapat melihat dan mengukur hasil kinerja Pemda.⁵

Dalam usaha selalu dihadapkan pada permasalahan matematis untung dan rugi. Dalam hal ini yang harus diyakini adalah bahwa muamalah dalam islam bukan masalah untung dan rugi namun lebih kepada menghidupkan syariat Allah dan mencari ridho Allah seperti firmanNya.

Surat Az-Zumar 52 :

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya (bagi siapa yang Dia kehendaki)? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman”.

⁴ <https://www.kompasiana.com/dita180599/5fc61ce18ede481026544212/teori-keagenan-agency-theory>

⁵ Kurniawan, A.R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1-20.

Surat Al Anfal 27 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Pada ayat al-qur'an diatas dijelaskan bahwa kita tidak boleh mengingkari perintah yang diberikan kepada kita. Dalam artian sesuatu yang sudah di amanatkan kepada kita tidak boleh kita ingkar dan harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dalam agency teori dijelaskan hubungan keagenan antara yang memberi kewenangan dan yang menjalankan kewenangan. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan harus menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya.

2.2 *Stewardship Theory*

Dikatakan pada penelitian Tania Febrianti dan Indrawati (2021) menurut Donaldsom & Devis pada tahun 1991 *Stewardship theory* adalah keadaan dimana para manajer atau pelaku manajemen lebih mengutamakan kepentingan bersama ataupun organisasi daripada kepentingan pribadi mereka. *Stewardship theory* didasarkan pada filosofi mengenai sifat-sifat manusia diantaranya mampu bertindak dan bertanggungjawab, dapat dipercaya, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan pihak yang berkepentingan. Dalam teori ini didasarkan pada kepuasan dan kesuksesan untuk mencapai tujuan organisasi. Teori ini cocok untuk diterapkan pada organisasi sektor publik dan pemerintahan.

Stewardship theory menekankan kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi pemerintah⁶. Pemerintahan harus bertindak sebagai pengelola sumber daya publik dan memastikan bahwa keputusan yang dibuat harus dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang publik (Bozeman dan Rainey, 2000). Penerapan *stewardship theory* dalam organisasi pemerintah membantu memastikan organisasi pemerintah bertindak secara bertanggungjawab kepada publik⁷. Seorang pemimpin organisasi pemerintah harus bertindak sebagai pelayan, menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadinya, serta melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

⁶ Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerahdi Masa Pandemi Covid-19(Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Manajerial*, 10(2).

⁷ Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerahdi Masa Pandemi Covid-19(Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Manajerial*, 10(2).

Implikasi dari *Stewardship theory* adalah menjelaskan keberadaan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bisa dipercaya, melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik, meningkatkan pelayanan publik. Akuntabilitas dan *Stewardship* memiliki arti yang sama yaitu pertanggungjawaban.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

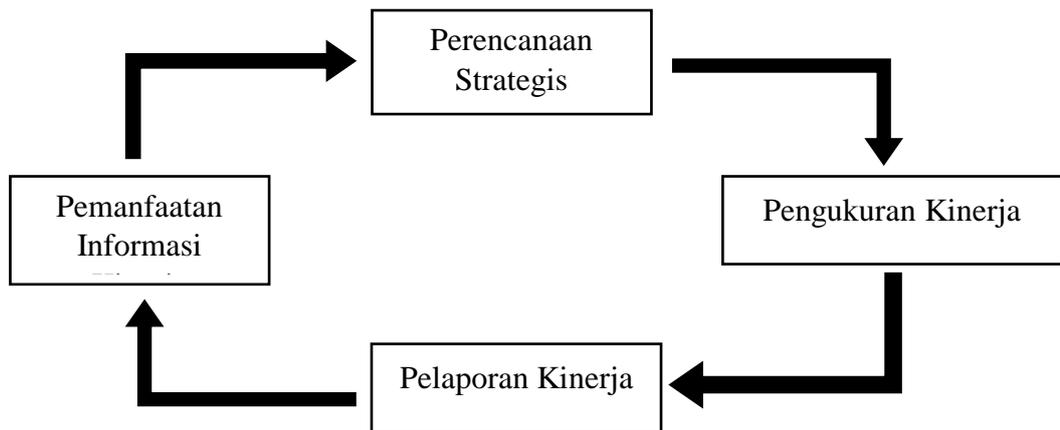
Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua aktivitas yang telah dilakukan. Dalam konteks pemetintahan akuntabilitas dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas berhasil atau tidaknya pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan hasil yang diperoleh atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam periode tertentu. Kinerja juga dapat dikatan sebagai gambaran tingkat capaian dari pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan organisasi. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah⁸.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur dalam Inpres nomor 7 tahun 1999, menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi, dalam rangka mengelola sumber daya yang diberikan, dalam mencapai tujuan, melalui media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran dari kegiatan yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang sudah terukur. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program, kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun periodik⁹.

⁸ Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.

⁹ Kurniawan, A.R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1-20.

Gambar 2. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>

Tabel 2.1 Bobot Penilaian Komponen Evaluasi AKIP

No	Komponen	Bobot	Sub komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	Rencana Strategis/ Renstra (10%), Rencana Kinerja Tahunan/ RKT (20%)
2.	Pengukuran Kinerja	25%	Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%), Implementasi pengukuran (7,5%)
3.	Pelaporan kinerja	15%	Pemenuhan pelaporan (3%), Kualitas pelaporan (7,5%), Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4.	Evaluasi internal	10%	Pemenuhan evaluasi (2%), Kualitas evaluasi (5%), Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5.	Capaian kinerja	20%	Kinerja yang dilaporkan (output) (5%), Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Sumber : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41515/perpres-no-29-tahun-2014>

Tabel 2 1Kategori Nilai dan Interpretasi Evaluasi AKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	D	0 – 30	Sangat kurang

Sumber : www.menpam.go.id

2.3.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut islam

Akuntabilitas dalam kata lain adalah pertanggungjawaban, dalam islam akuntabilitas tidak hanya ditunjukkan kepada masyarakat (principal) tetapi kepada Allah SWT. Akuntabilitas dalam perspektif islam memandang bahwa semua manusia harus mempertanggungjawabkan semua hal yang telah dilakukannya kepada allah. Dalam surah At-Taha ayat 6 :

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Artinya : “Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah”.

Allah merupakan pencipta dari semua yang ada di alam semesta, apa yang kita perbuat dan lakukan semua dalam pandangan Allah. Bahkan saat kita sekeras apapun menyembunyikan sesuatu allah akan mengetahui itu. Maka dari itu para pejabat pemerintah harus melaporkan apapun yang telah diperbuatnya dengan jujur dan apa adanya. Pemerintah sebagai agen yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk menjalankan tujuan bagi kesejahteraan bersama harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemerintah sebagai orang yang diberi tanggungjawab harus melakukan tugasnya dengan sepehuh hati dan sesuai dengan aturan yang ada. Ketepatan waktu dan menjalankan dengan benar. Dalam menjalankan tanggungjawabnya harus sesuai undang-undnag yang berlaku.

2.3.3 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berikut ini adalah indikator dalam untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah menurut Frika Dinasari, 2021 :

1) Perencanaan Kinerja.

Proses penyusunan rencana kinerja yang telah dijabarkan dalam rencana strategis, yang berisi sasaran dan program yang akan dilakukan dalam satu periode tahunan.

2) Pengukuran Kinerja.

Suatu yang dilakukan untuk mengukur suatu aktivitas dalam rentan nilai yang ada dalam perusahaan.

3) Pelaporan Kinerja.

Ikhtisar yang didalamnya menjelaskan hasil kinerja sebagai bukti pertanggungjawaban dalam waktu tertentu.

4) Evaluasi Kinerja.

Mereview hasil kinerja dari suatu pegawai, dalam hal ini pemimpin menilai dan menentukan prestasi kerja bawahannya dalam melakukan tanggungjawabnya.

5) Capaian Kinerja.

Suatu proses untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.

2.4 Sistem Pelaporan

2.4.1 Pengertian Sistem Pelaporan

Sistem berasal dari bahasa Yunani “Sytema” artinya kesatuan, seluruh bagian yang memiliki hubungan satu sama lain. Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Pelaporan atau laporan adalah hal yang selalu berkaitan dengan keuangan. Pelaporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan disusun oleh pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Sistem pelaporan adalah suatu bentuk tanggungjawab pelaporan dari bawahan ke atasan yang bertujuan memberikan informasi mengenai tindakan yang telah diambil dalam penggunaan anggaran kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Sistem pelaporan kinerja merupakan perwujudan kewajiban atau akuntabilitas untuk melaporkan semua aktivitas sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan keuangan pemerintah yang baik tercipta jika laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan juga persyaratan pelaporan keuangan menurut organisasi sektor publik. Dalam pelaksanaan anggaran yang sudah dibuat terdapat proses yang jelas mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian manajerialnya. Laporan keuangan yang baik harus dibuat dengan sebenar-benarnya, bersifat jujur, objektif dan transparan. Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja, kemudian menyampaikannya adalah instansi

pemerintah pusat. Penanggung jawabnya adalah pejabat yang fungsional bertanggungjawab melayani administrasi masing-masing instansi.

2.4.2 Indikator Sistem Pelaporan

Untuk mengukur sistem pelaporan diperlukan indikator. Berikut ini indikator Sistem Pelaporan di adopsi dari Edipson Bayer Silalahi (2017) :

1) Kesesuaian terhadap Peraturan yang berlaku.

Dalam setiap kegiatan, pengambilan keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah daerah tertulis maupun tidak menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan

2) Rencana Strategis.

Dokumen yang berisi aturan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun.

3) Perjanjian Kinerja.

Pernyataan berupa komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 1 tahun dengan mempertimbangkan SDM.

4) Pengukuran Kinerja.

Proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran, sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

5) Pengelolaan Data Kinerja.

Aktifitas yang dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.

6) Pelaporan Kinerja.

Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja setiap Unit Kerja.

2.4.3 Hubungan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat beberapa komponen yang dianggap penting seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian kinerja. Sistem pelaporan yang efektif diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja instansi pemerintah dalam pelaksanaan anggaran yang telah disetujui.

Diperlukan sistem pelaporan yang efisien untuk mengawasi kinerja manajer dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki tanggung

jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), laporan yang dapat dianggap baik adalah laporan yang dibuat dengan keadaan yang sebenarnya, obyektif, dan transparan. Laporan keuangan dalam sektor publik memiliki peranan penting karena berkontribusi pada pembentukan akuntabilitas sektor publik. Informasi keuangan yang ada dalam laporan tersebut menjadi dasar untuk pengambilan keputusan. Karakteristik yang menjadikan suatu laporan dianggap baik adalah kelayakan, keandalan, kemudahan pemahaman, menarik, verifikasi yang memungkinkan, netralitas, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

2.4.4 Sistem Pelaporan menurut Perspektif Islam

Surah al-An'am, ayat 52 :

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

Artinya : “Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim”.

Menyajikan suatu laporan harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dan tepat waktu. Semua yang di laporkan harus sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Seorang begawai yang diberi tugas oleh atasannya harus dilakukan dengan benar dan sungguhgana. Dengan sistem pelaporan sesuai dengan kebijakan yang ada, maka kita akan mendapatkan keridaan dari allah.

Surah An-Nisa, ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

An-nisa ayat 58 menjelaskan tentang amanah. Dalam konteks sistem pelaporan kita harus amanah. Amanah adalah sesuatu yang dapat dipercaya. Sebagai pegawai pemerintah yang diberi amanah oleh rakyat kita harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Sistem pelaporan yang amanah sebagai pengendali dan pemantau kinerja dari para pegawai dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

2.5.1 Anggaran

Anggaran adalah pernyataan berkaitan dengan estimasi kinerja yang akan dicapai dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial¹⁰. Anggaran dalam sektor publik memberi andil dalam akuntabilitas, anggaran publik digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pegawai dan informasi perencanaan keuangan. Anggaran publik harus diinformasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk semua yang telah dialokasikan.

Adanya anggaran berdampak baik dan buruk bagi suatu individu. Dampak buruk dari suatu anggaran untuk individu adalah saat proses perencanaan anggaran dapat terjadi hal yang menyimpang dari tujuan awal, kesenjangan, bahkan penyelewengan anggaran. Hal ini bisa menjadi bentuk penilaian untuk menilai kinerja pegawai. Kinerja pegawai dikatakan baik ketika mereka bertanggungjawab dan melakukan semua penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan menyertakan bukti berupa laporan.

2.5.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran itu ditetapkan secara spesifik dan jelas tujuannya supaya mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Munawar, 2006). Maka dari itu sasaran anggaran harus dibuat dengan jelas, nyata, spesifik dan mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah harus bisa diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasinya dimasa mendatang yang tertuang dalam visi misinya.

¹⁰ Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Hal 75.

Kejelasan sasaran anggaran pemerintah daerah erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah. APBD pada dasarnya memuat arah dan kebijakan umum berkaitan dengan informasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai suatu daerah pada masa depan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan merupakan arah dan sasaran adalah batasan. Dalam rangka mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan kejelasan sasaran anggaran. Adanya anggaran yang jelas sasarannya diharapkan akan mempermudah dalam mengidentifikasi kegagalan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang sejak awal., karena didalamnya menggambarkan sasaran kinerja yang jelas. Hal ini diperlukan untuk mendorong para pegawai melakukan tugas dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.5.3 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Indikator kejelasan sasaran anggaran dalam penelitian Frika Dinasari (2021), yaitu :

1) Pusat tanggung jawab.

Unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk kegiatan dan hasilnya. Dalam pertanggungjawaban akuntansi pendapatan dan biaya informasi yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh pusat-pusat tanggung jawab.

2) Perencanaan.

Penjelasan rencana yang terperinci mengenai pemasukan dan pembiayaan organisasi, supaya pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

3) Bidang kegiatan.

4) Prioritas dan Realisasi Anggaran.

Prioritas adalah sesuatu yang diutamakan. Dalam menyusun anggaran harus memperhatikan skala prioritas yang paling penting dan *urgent*.

Realisasi anggaran merupakan kegiatan melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

2.5.4 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan yang spesifik, supaya anggaran bisa dipahami dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan anggaran tersebut. Anggaran yang sudah disetujui oleh pemerintah seharusnya

mencerminkan dengan tepat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh anggaran tersebut. Jika anggaran tidak menggambarkan tujuan yang jelas maka akan ada masalah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anggaran memiliki sasaran yang jelas. Anggaran yang jelas dapat memberikan manfaat yang signifikan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.

Anggaran pemerintah daerah merupakan komponen dalam pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang harus berorientasi pada akuntabilitas. Anggaran daerah harus dibuat dan diinformasikan hasilnya kepada publik untuk mencapai tingkat kinerja yang memenuhi harapan publik dan memastikan adanya akuntabilitas kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam memengaruhi akuntabilitas kinerja. Dalam penyusunan anggaran akan terlihat individu tersebut membuat rencana anggaran sesuai dengan aturan atau melakukan penyelewengan. Pegawai yang sudah sesuai dengan aturan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik.

Salah satu faktor yang menyebabkan inefisiensi dan efisiensi anggaran yang kurang optimal adalah ketidakjelasan tujuan anggaran. Hal ini dapat membuat aparat pemerintah daerah kesulitan dalam menetapkan target-target anggaran yang harus dicapai., anggaran sangat penting dalam pengelolaan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif.

2.5.5 Kejelasan Sasaran Anggaran menurut Perspektif Islam

Al-Nisa, ayat 94 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ
السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَصَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ
كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, bertabayunlah (carilah kejelasan) dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, “Kamu bukan seorang mukmin,” (lalu kamu membunuhnya) dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada ayat di atas dijelaskan tentang kejelasan. Dalam hal ini kejelasan adalah *tabayun*. Mencari kejelasan dalam hal ini berupa informasi yang sebenarnya dan valid. Informasi harus diperoleh dari sumber yang benar dan saat mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa. Maka dari itu dalam proses

penyusunan anggaran oleh instansi pemerintah harus jelas sasarannya, membagi dalam skala prioritas dari yang paling penting.

2.6 Sistem Pengendalian Internal

2.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi dan memandu kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan untuk mencegah atau mendeteksi penipuan. Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen yang bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi¹¹.

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan anggota organisasi pemerintahan guna memberi kepercayaan dalam pencapaian tujuan organisasi. Penerapan sistem pengendalian internal lembaga pemerintah bertujuan memberikan kepercayaan yang memadai terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Ada 5 indikator sistem pengendalian internal menurut Ni Made Sudiarianti (2015), yaitu :

1) Penilaian Risiko.

Proses yang dilakukan instansi dan bagian integral dari proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan, indentifikasi, analisi, evaluasi.

2) Lingkungan Pengendalian.

Seluruh komitmen, etika, nilai perusahaan, perilaku, kepedulian, dan langkah-langkah dari semua individu dalam suatu instansi/perusahaan.

3) Informasi dan Komunikasi.

Sebagai salah satu komponen penting dalam pengendalian internal adanya informasi dan komunikasi penting adanya untuk membentuk kebijakan, analisis risiko, serta pengawasan.

4) Kegiatan pengendalian.

¹¹ Mulyadi. 2002. Auditing. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah efektif.

5) Pemantauan.

Pemantauan bertujuan untuk memastikan semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pengawasan membantu manajemen perusahaan dapat melakukan indentifikasi suatu hal untuk menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan.

2.6.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem pengendalian internal yang baik dan efisien adalah salah satu kunci kesuksesan pelayanan operasional yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini sering disebut sistem pengendalian internal pemerintah, sistem ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel bisa dicapai dengan menerapkan sistem pengendalian internal pada semua kegiatan yang telah tertarget. Sehingga seluruh kegiatan diharapkan dapat terlaksana secara terarah, tertip, efisien dan efektif. Sistem pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan oleh pegawai untuk memberi keyakinan yang cukup atas capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

2.6.4 Sistem Pengendalian Internal menurut Perspektif Islam

Al Mujadilah, ayat 7 :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ
إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Artinya : “Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa

yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam al-mujadilah ayat 7 berkisah tentang dimana allah mengetahui apapun yang ada dimuka bumi walaupun itu dirahasiakan antar manusia. Allah mengawasi apapun tindakan manusia dengan seksama. Maka dari itu adanya sistem pengendalian internal dalam instansi pemerintah ini perlu untuk keberlangsungan kinerja yang baik. Sistem pengendalian dalam kata lain adalah pengawasa. Pengawasan harus dilakukan supaya para pegawai bekerja sesuai dengan peraturan dan tidak seenaknya. Pegawai harus takut jika akan melakukan kecurangan karena allah selalu mengawasi mereka.

2.7 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

2.7.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi dari pengumpulan, penyusunan data, sampai pelaporan keuangan dan operasional keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah menunjukkan serangkaian proses akuntansi, mulai dari proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpan di jurnal, memposting buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi, dan menyiapkan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD-SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan, menilai akuntabilitas kinerja dari entitas pelapor terhadap sumber daya yang dikelolanya. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran,
- 2) Laporan Perubahan SAL/SAK,
- 3) Neraca,
- 4) Laporan Operasional,
- 5) Laporan Perubahan Ekuitas,
- 6) Laporan Arus Kas,
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan alat digunakan untuk menerapkan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari sistem akuntansi SKPD, sistem akuntansi PPKD, bagan akun standar. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sistem akuntansi PPKD adalah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD, PPKD juga melakukan konsolidasi laporan keuangan. Bagan Akun Standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah.

2.7.2 Indikator Sistem Akuntansi Pemerintah

Dalam pelaksanaannya pemerintah mengacu pada SAP dalam penyusunan dan penyajian laporan untuk menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Indikator sistem akuntansi pemerintah oleh Rosiana (2021), yaitu :

1) Pencatatan.

Proses awal dalam akuntansi, tahap dimulainya siklus akuntansi seperti pencatatan transaksi, pembukuan, sampai menjadi sebuah laporan keuangan.

2) Penggolongan.

Dalam akuntansi pengelompokan akun yang digunakan berdasarkan jenis atau klasifikasinya.

3) Pelaporan.

Penyampaian semua informasi keuangan yang telah dibuat dengan sebaik dan sebenar-benarnya, biasanya berupa laporan keuangan.

2.7.3 Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) jika para SKPD melakukan sesuai dengan panduan dan aturan maka akan menghasilkan *output* yang baik. Unsur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam penelitian ini

adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika semua unsur tersebut dilakukan saat membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban maka akan menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari penerapan sistem akuntansi pemerintah ini agar semua SKPD tertib dalam administrasi dan pelaporan keuangannya. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Adanya sistem akuntansi pemerintah juga memungkinkan adanya kegiatan akuntansi yang selaras antara satu instansi satu dan lainnya, hal ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi daerah.

2.7.4 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah menurut Perspektif Islam

Al Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penerapan sistem akuntansi daerah salah satu yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangannya, agar laporan yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam membuat laporan harus bisa bertanggungjawabkan hasilnya, kebenaran dan keadilan harus menjadi landasan dari setiap apa yang di tulis oleh pemerintah dalam laporan keuangannya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel Independen	Variabel Dependent	Hasil
1	Nur Desiana Wardani, Dewi Silvia. (2021)	Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Pemjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung.	Anggaran berbasis kinerja. Kejelasan sasaran anggran.	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. • Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2.	Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno. (2019).	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pendalian Akuntansi dan sistem pelaporan	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan.	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan sasaran anggran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

		terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.			<p>kinerja instansi pemerintah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. • Sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3.	Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Akuntabilitas Pemerintah	Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4.	Evada Dewata. Yuliana Sari. Hadi Jauhari. Tifani Dwi Lestari. (2020).	Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5.	Winda Muslimahi, Taufeni dan Rusli (2023)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, Ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

		Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.			
6.	Ajhar, Akram, Endar Pituringsih. (2015)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu)	Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Teknologi Informasi (TI).	Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual (KPSA) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Sistem Pengendalian Intern (SPI), teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7.	Pandu Haryando, Ratih Tri Andayani (2023)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, Teknologi Informasi	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pelaporan, Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8.	Riska Dwi Fitriana, Nur Hidayati, M. Cholid Mawardi. (2018)	Kejelasan Sasaran, Anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo	Kejelasan Sasaran, Anggaran Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan.	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Pelaporan berpengaruh

					positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
9	Dina Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti. (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang)	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. • Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh.
10	Rio Pratama, Henri Agustin, Salma Taqwa. (2019)	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. • Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada penelitian terdahulu masih terdapat *inkosistensi* pada penerapan variabelnya, hasil penelitiannya masih menunjukkan ada yang berpengaruh positif dan negatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam objeknya yang diteliti, pada penelitian sebelumnya belum ada yang membahas Pemerintahan Kabupaten Demak. Pembahasan variabel Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah masih jarang

digunakan. Peneliti terdahulu juga menyebutkan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan dua teori yaitu *agency* teori dan *stewardship* teori sedangkan pada penelitian terdahulu rata-rata masih menggunakan satu teori saja.

2.9 Hipotesis Penelitian

2.9.1 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan daerah.

Sistem pelaporan kinerja merupakan perwujud kewajiban atau akuntabilitas untuk melaporkan semua aktivitas sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan yang baik adalah laporan yang dibuat dengan jujur, transparan, objektif, dan harus sesuai dengan SAP. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk mengontrol kinerja manajerial dalam mengatur anggaran yang telah ditetapkan dan rencana kerja yang telah dilakukan. Dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah bisa mengetahui program-program ataupun capaian yang telah dilakukan, meninjau dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai dengan rencana guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dalam mencapai visi misi dan kepuasan publik. Dalam hal ini pemerintah sebagai *Steward* yang berusaha mencapai tujuan organisasi, maka dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah membuktikan bahwa mereka telah melakukan kegiatan dan melaporkan semua anggaran yang dilakukan dengan baik.

Suatu sistem pelaporan yang baik dan benar dapat menjadikan laporan akuntabilitas instansi pemerintah semakin baik. Karena sistem pelaporan yang sesuai dengan ketentuan membuktikan bahwa akuntabilitas kinerjanya baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019) menemukan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian oleh Evada

Dewata.Yuliana Sari.Hadi Jauhari. Tifani Dwi Lestari (2020) menemukan bahwa secara parsial ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

H1 : sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan daerah.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran itu ditetapkan secara spesifik dan jelas tujuannya supaya mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran berkaitan dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pusat yang harus dialokasikan secara jelas dan transparan. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan mudah dimengerti oleh yang bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah harus bisa diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasinya dimasa yang akan datang tertuang dalam visi misinya.

Stewardship theory menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan kepuasan organisasi yang memaksimumkan visi misi. Hubungannya dengan kejelasan sasaran anggaran adalah sasaran yang jelas dan spesifik bisa mendorong pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki guna mensejahterakan masyarakat dengan program-program yang sudah dibuat.

Penelitian oleh Devika Diah Precelina, Eni Wuryani (2019) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Zuraifa Nadila, Muhammad Ahyaruddin, Agustiawan

(2021) juga menyatakan kejelasan sasaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan daerah.

Sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang membatasi, memandu kegiatan dalam pemrosesan data keuangan dengan tujuan mencegah atau mendeteksi penipuan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Sistem pengendalian intern membantu dalam proses pengendalian yang dilakukan dalam suatu kerja instansi. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjadi indikasi bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah sudah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan. Hubungan *agency teory* dimana masyarakat adalah agennya dan pemerintah sebagai principal. Masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika sistem pengendalian internalnya bagus maka akan didapati laporan keuangan yang andal dan terpercaya. Laporan keuangan yang baik membuktikan bahwa para pegawai pemerintah daerah melakukan tugas dengan semestinya. Dalam penelitian ini *agency teory* dimana masyarakat adalah pricipal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untk melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pada penelitian Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2020) ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan pada penelitian Pandu Haryando dan Ratih Tri Andayani (2023) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

H3 : sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.9.4 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan alat digunakan untuk menerapkan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. Sistem akuntansi pemerintah daerah menunjukkan serangkaian proses akuntansi, mulai dari proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpan di jurnal, memposting buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi, dan menyiapkan laporan keuangan. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah diperikan para pemangku kepentingan, dalam rangka mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Sesuai dengan *agency teory* penerapan sistem akuntansi pemerintah pemerintah yang baik akan menimbulkan hasil yang sesuai dengan tujuan dan aturan. Dalam hal ini pemerintah sebagai agen dan masyarakat atau pemerintah pusat adalah principalnya yang memberikan wewenang. Kepatuhan pada penerapan sistem akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang baik dan jelas.

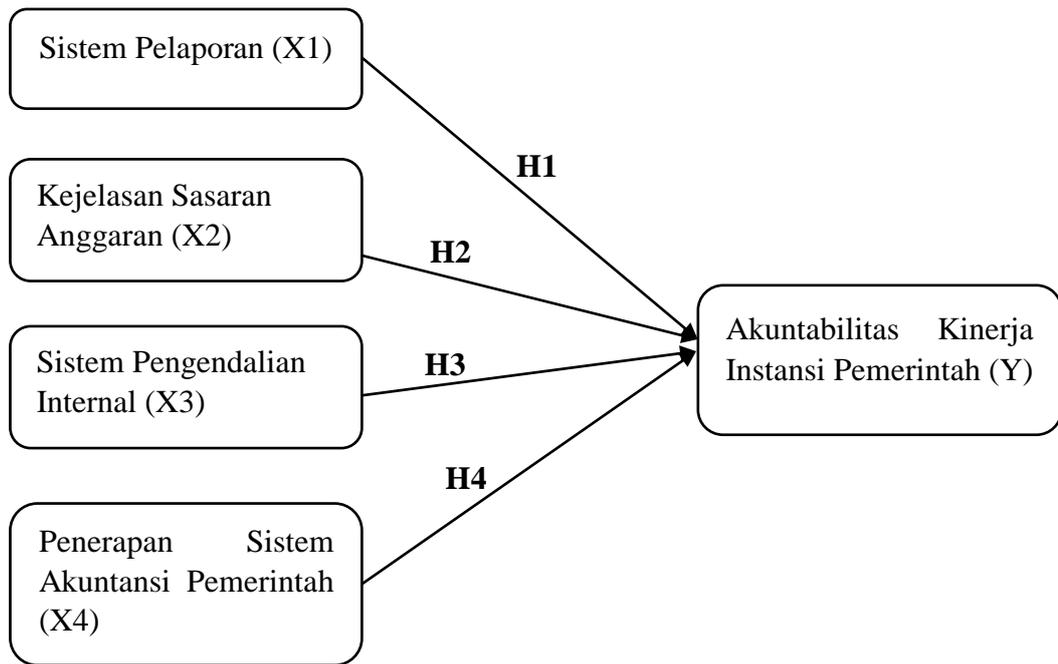
Penelitian oleh Dina Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021) menemukan bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan hasil yang sesuai dan baik, maka dari itu akuntabilitas kinerjanya juga akan baik. Lalu pada penelitian oleh Winda Muslimahi, Taufeni Taufik dan Rusli (2023) menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan rumusan diatas maka hipotesis yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

H4 : sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

2.10 Peta Konsep

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian merupakan metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mengumpulkan data dengan tujuan untuk dapat mendeskripsikan, mendemonstrasikan, mengembangkan dan menemukan pengetahuan, teori, memahami, memecahkan dan memprediksi masalah tema kehidupan manusia ¹². Metode penelitian ada 2 jenis yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif lebih sering digunakan daripada metode kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka dari mulai proses pengumpulan data sampai penafsirannya. Kuantitatif adalah metode penelitian di dasarkan pada data konkrit, data penelitiannya berupa angka dengan statistik sebagai alat penghitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan sesuatu yang sudah dipelajari, kemudian menarik kesimpulan dari fenomena yang telah diamati menggunakan angka-angka.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi dari suatu hal yang diperoleh dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, dan mengisi angket. Data yang diperoleh kemudian diolah lagi agar hasilnya dapat dinikmati dengan baik. Data yang diperoleh merupakan fakta bukan suatu pemikiran ataupun perkiraan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden biasanya berupa hasil wawancara, observasi, dan kuesioner. Data dalam penelitian ini diperoleh dari angket atau kuesioner yang diberikan kepada responden yang telah ditentukan.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan seluruh elemen sejenis namun dapat dibedakan satu dengan yang lain, yang menjadi pembeda adalah nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah Instansi Pemerintah yang berbentuk

¹² Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Dinas di Kabupaten Demak. Jumlah SKPD di Kabupaten Demak adalah 42, yang berbentuk dinas ada 18. Kabupaten Demak dipilih sebagai populasi dalam penelitian ini karena terdapat beberapa SKPD yang belum membuat LKJIP. Dari 18 Dinas hanya 10 yang membuat LKJIP dan 8 belum membuat LKJIP.

3.3.2 Sampel dan teknik pengambilan sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti, yang ciri-ciri dan keberadaannya dapat mewakili populasi yang sebenarnya. Supaya diperoleh distribusi nilai pengukuran yang normal maka jumlah responden untuk sebuah uji kuesioner dengan uji reabilitas dan uji validitas yaitu minimal 30 responden¹³.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Non probability sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah peluang. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu¹⁴. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel yang diambil berdasarkan penilaian yang pasti mengenai populasi secara keseluruhan. Dalam hal ini diambil sampel yang paling mewakili dari suatu organisasi.

Berdasarkan populasi diatas ditentukan sampel sebanyak 18 SKPD yang berbentuk Dinas di Kabupaten Demak, kemudian diambil 3 pegawai setiap instansinya. Setiap kantor SKPD diambil 1 Kepala Dinas, 1 Kepala bagian Keuangan, serta 1 Kepala bagian Perencanaan. Jumlah sampelnya 18 SKPD×3 orang pegawai =54 responden. Kepala Dinas dipilih sebagai responden karena semua hal yang akan dilakukan di dalam instansi harus atas persetujuan kepala dinas. Kepala bagian keuangan dipilih karena dalam semua kegiatan yang telah direncanakan pasti terdapat biaya yang harus dikeluarkan, jadi sebagai kepala bagian keuangan tahu seberapa banyak biasaya yang keluar dan kemudian dilaporkan secara rinci. Kepala bagian perncanaan dan pelaporan dipilih sebagai responden karena dalam hal ini mengetahui sejauh mana perencana program dan pelaporan dilakukan.

¹³ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

¹⁴ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tabel 3. 1 Jumlah Sampel

No	Nama SKPD	Responden			Jumlah per SKPD
		Kepala Dinas	Kepala Bagian Keuangan	Kepala Bagian Perencanaan	
1	Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan	1	1	1	3
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	1	1	1	3
3	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	1	1	1	3
4	Dinas PU dan Tata ruang	1	1	1	3
5	Dinas Kesehatan	1	1	1	3
6	Dinas Pariwisata	1	1	1	3
7	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	1	3
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1	1	1	3
9	Dinas Perhubungan	1	1	1	3
10	Dinas Perdagangan Dan Koperasi	1	1	1	3
11	Dinas Penanaman Modal,Perizinan Terpadu Satu Pintu	1	1	1	3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	1	3
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	1	3
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	1	1	3
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	1	1	1	3
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,Pengendalian Penduduk dan KB	1	1	1	3
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	1	1	1	3
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1	1	1	3
JUMLAH					54

Sumber : Data primer, 2023

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah atribut atau nilai dari suatu orang, obyek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya¹⁵. Dalam penelitian ini ada dua macam variabel, yaitu dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dan independen

¹⁵ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

(sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi pemerintah).

Tabel 3. 2 Variabel Penelitian

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).	Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 1) Perencanaan Kinerja. 2) Pengukuran Kinerja. 3) Pelaporan Kinerja. 4) Evaluasi Kinerja. 5) Capaian Kinerja. Frika Dinasari (2021)
Sistem Pelaporan (X1)	Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan yang baik dibuat supaya bisa memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan (Abdullah,2005).	Sistem pelaporan memiliki indikator yaitu : 1) Kesesuaian Terhadap Peraturan yang berlaku. 2) Rencana Strategis. 3) Perjanjian Kinerja. 4) Pengukuran Kinerja. 5) Pengelolaan Data Kinerja. 6) Pelaporan Kinerja. Edipson Bayer Silalahi (2017)
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran tersebut ditetapkan secara spesifik dan jelas tujuannya supaya mudah dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggran tersebut (Munawar, 2006).	Indikator dalam kejelasan sasaran anggran yaitu : 1) Pusat tanggung jawab. 2) Perencanaan. 3) Bidang kegiatan. 4) Prioritas dan Realisasi Anggaran. Frika Dinasari (2021)
Sistem Pengendalian Intern (X3)	Sistem pengendalian intern merupakan proses yang dijalankan dewan komisaris, manajemen, maupun personel lain yang bertujuan untuk memberikan keyakinan tentang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan	Ada 5 indikator pengendalian internal yaitu : 1) Lingkungan Pengendalian. 2) Penilaian Risiko. 3) Kegiatan pengendalian. 4) Informasi dan Komunikasi. 5) Pemantauan.

	efisiensi operasi (Mulyadi, 2002).	Ni Made Sudiarianti (2015).
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah Sistem akuntansi dari proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja (Erlina Rasdianto, 2013).	Indikator sistem akuntansi pemerintah yaitu : 1) Pencatatan. 2) Penggolongan. 3) Pelaporan. Rosiana (2021)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner sendiri adalah seperangkat pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden, yang kemudian akan dijawab oleh responden.

3.5.1 Kuesioner

Kuesioner adalah alat atau teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan maupun pernyataan tertulis kepada responden. Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup, dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan dan jawabannya yang harus diisi oleh responden sesuai dengan keadaanya. Berikut adalah tabel nilai dari jawaban :

Tabel 3. 3 Skor Jawaban

No	Alternatif Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Tidak Setuju	2
4.	Sangat Tidak Setuju	1

3.6 Uji Instrumen

Pengujuan instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrumen dalam kuesioner yang digunakan, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan data. Dalam uji Instrumen terdapat uji validitas dan uji reabilitas.

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya sebuah kuesioner sebelum di berikan kepada responden¹⁶. Uji validitas diukur menggunakan spss. Validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur bisa mengukur apa yang ingin diukur. Kuesioner dikatakan valid jika butir pernyataan dalam kuesioner tersebut bisa mengungkapkan sesuatu yang akan diukur¹⁷. Uji validitas kuesioner memiliki kriteria apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan nilai *Signifikansi degree of freedom* (df)= n-2 maka dinyatakan valid. Namun jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dinyatakan tidak valid¹⁸.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kereabelan suatu jawaban dari koesioner. Kriteria uji reabilitas dapat dilihat dari nilai *cronbach's alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpha*>0,60. Instrumen yang menghasilkan ukuran konsisten dalam waktu berbeda meskipun digunakan secara berulang maka dapat diindikasikan instrumen tersebut sudah memenuhi syarat reabilitas¹⁹.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.9.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan menguji apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Distribusi yang normal akan memebentuk garis lurus diagonal, plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data ini adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas begitu sebaliknya²⁰. Dapat dikatakan normal apabila nilai probabilitasnya > 0,05.

¹⁶ Istiariyani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 2772–2785.

¹⁷ Ghozali, Imam. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹ Istiariyani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 2772–2785.

²⁰ Ghozali, Imam. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

3.9.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk melihat apakah antara variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Model regresi yang baik harusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol²¹.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (*Variance inflation factor*). Jika nilai VIF > 1 dan < 10 sedangkan toleransinya < 1 maka model regresi tidak mengandung multikolinieritas.

Pengujian multikolinieritas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinieritas.
- Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinieritas.

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menghasilkan ketimpangan varian dari satu residu ke residu lainnya antara variabel bebas (independen). Cara menentukan adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan teknik uji *glejser*. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya > 0,05, tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi, tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi²².

3.8 Uji Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, dengan menggunakan komputer melalui SPSS. Menurut Sugiyono, 2015

Persamaan yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

α = Konstanta.

X1 = Sistem Pelaporan.

²¹ Ghozali, Imam. (2018). "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²² Ghozali, Imam. (2018). "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran.
 X3 = Sistem Pengendalian Internal.
 X4 = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi.
 e = error.

3.8.2 Uji T

Uji t untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji t adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau di terima²³. Berikut adalah cara menghitung t_{tabel} :

$$T_{tabel} = t(a/2; n-5-1)$$

a : koefisien

n : jumlah sampel

3.8.3 Uji F

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji F yang menjadi acuannya adalah nilai signifikansinya, dimana nilai signifikansi jika $< 0,05$ maka hipotesis diterima. Dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak²⁴. berikut cara menghitung F_{tabel} :

$$F_{tabel} = f(k; n-k)$$

3.8.4 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh antara variabel independen pada variabel dependen ditandai dengan nilai *adjusted R-Square*. Jika nilai R^2 kecil maka dapat dikatakan bahwa variabel –variabel independen dalam mempengaruhi dan menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Namun sebaliknya jika nilai R^2 tinggi atau mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel independen dapat menjelaskan dengan baik.

²³ Ghozali, Imam. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

²⁴ Ghozali, Imam. (2018). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Kabupaten Demak

Demak dulunya adalah wilayah dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, dimana rata-rata masyarakatnya beragama islam. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit banyak daerah bawahannya yang mendirikan kerajaan sendiri. Sejarah Demka tidak lepas dari pemerintahan terakhir kerajaan Majapahit yakni Prabu Brawijaya V atau lebih dikenal Prabu Kertabumi.

Sultan pertama dari Kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Raden Fatah adalah Putra Prabu Kertabumi dan Putri Cempa. Saat dewasa Raden Fatah berguru pada Sunan Ampel dan menikah dengan putri Sunan Ampel Nyai Ageng Maloka. Raden Fatah bermukim di Glagah wangi atau Bintoro dan menyiarkan agama islam. Setelah berjalannya waktu Bintoro semakin berkembang bukan hanya sebagai pusat penyiaran agama islam, namun juga pusat militer, politik, perdagangan, dan pengembangan budaya Islam Indonesia. Dan Raden Fatah diangkat mnejadi eorang Adipati Notopraja.

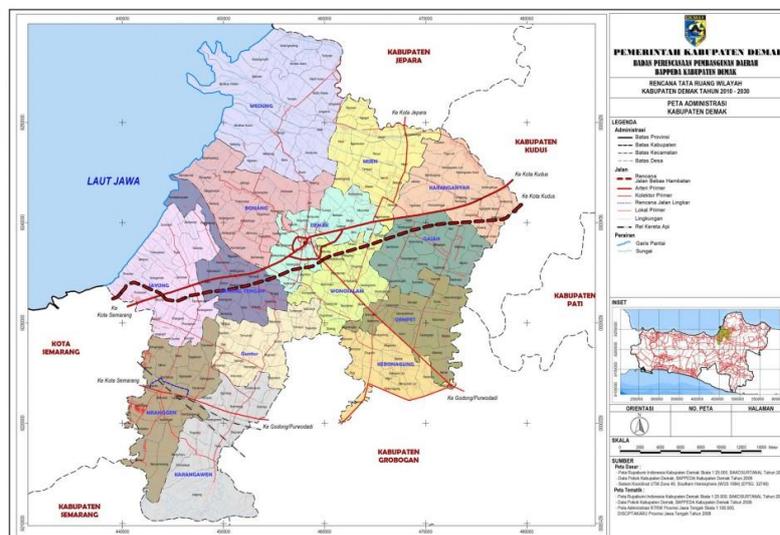
Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran diwarnai dengan munculnya pertengkarannya antara keturunannya Dinasti Singosari dengan Kediri. Girindra Wardana Dyah Rama Wijaya Putri Bhre Pandan Salas menyerang keraton Majapahit, dalam penyerangan ini Prabu Kertabumi gugur dalam perang. Kemudian Raden Fatah mengirimkan pasukan balasan yang dipimpin oleh Pangeran Kudus dan mengalahkan Kerajaan Majapahit. Dengan dukungan Walisongo dan para penguasa setempat Raden Fatah dinobatkan menjadi sultan Demak pertama. Gelar Raden Fatah adalah Senopati Jimbun Ngabdul Rahman Panembahan Palembang Sayidin Panatagama. Demak memperluas kekuasaannya ke barat yakni Cirebon. Tahun 1512 Masehi ekspedisi militer dikirimkan ke Malaka untuk memerangi penjajahan Portugis. Budaya islam semakin berkembang adanya paduan unsur budaya dan tradisi pra islam dengan islam sangat menarik²⁵.

²⁵ <https://demakkab.go.id/sejarah/demak>

Pada tahun 1521 sampai 1546 Kerajaan Demak mengalami puncak kejayaan di bawah kekuasaan Sultan Trenggono. Namun setelah kematian Sultan Trenggono tahun 1546 akibat terbunuh saat penyerangan di Kerajaan Blambangan Situbondo, muncul perebutan kekuasaan kerajaan. Dan setelah itu kerajaan Demak mengalami banyak konflik baik internal maupun eksternal. Dan pada tahun 1556 Raja dari kerajaan Pajang Adipati Hadiwijaya mengalahkan kerajaan demak dan menjadikan Demak wilayah kekuasaan Kesultanan Pajang.

4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Demak

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Demak



Demak merupakan salah satu Kabupaten di Jawa tengah yang letaknya ada pada $6^{\circ}43'26'' - 7^{\circ}09'43''$ LS dan $110^{\circ}27'58'' - 110^{\circ}48'47''$ BT, letaknya juga dekat dengan Kota Semarang yaitu sekitar 25 km di sebelah timur. Demak berada di rute 1 jalan Nasional (Pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Luas wilayah Kabupaten Demak kurang lebih $1.149,07 \text{ km}^2$, terdiri dari $897,43 \text{ km}^2$ daratan dan $252,34 \text{ km}^2$ lautan. Panjang pantai 34,1 km yang dimiliki Kabupaten Demak yang terbentang di 13 desa yaitu desa Bedono, Sriwulan, Timbulsloko, Surodadi (Kecamatan Sayung), Tambak Bulusan (Karangtengah), Morodemak, Purworejo, Betahwalang (Kecamatan Bonang), Desa Wedung, Berahankulon, Berahanwetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung)²⁶.

²⁶ <https://demakkab.go.id/publikasi/pemerintahan>

Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan dan 249 desa/kelurahan. Dalam menjalankan pemerintahannya Kabupaten Demak membawahi 42 OPD/SKPD yang terdiri dari sekretariat daerah, badan, dinas, kantor, kecamatan.

Tabel 4. 1 Daftar SKPD Kabupaten Demak

No	NAMA SKPD	ALAMAT
1	Sekretariat Daerah	Jl. Kyai Singkil No 7
2	Sekretariat DPRD	Jl. Sultan Trenggono
3	Inspektorat	Jl.Kyai Mugni Nomor 1016
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	JL.Kyai Jebat No.30 Bintoro Demak
5	Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan	JL.Raya Buyaran Demak No.65A
6	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	Jl. Kyai Jebat No 881A
7	BPBD	Jl. Bayangkara baru No 1
8	Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan	Jl. Sultan Fatah No.67
9	Dinas Pertanian Dan Pangan	Jl.Sultan Hadiwijaya No.8
10	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	Jl. Kyai Jebat No.35
11	Dinas PU dan Tata ruang	Jl. Kyai Jebat No.35
12	Dinas Kesehatan	Jl. Sultan Hadiwijaya No.44 Demak
13	Dinas Pariwisata	Jl. Sultan Fatah, No.53 Demak
14	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Bayangkara baru No1
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jl.Kyai Mugni No.10
16	Dinas Perhubungan	Jl. Sultan Trenggono No.16
17	Dinas Perdagangan Dan Koperasi	Jl. Kyai Mugni No.10
18	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Jl. Kyai Jebat No.36
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl.Sultan Hadiwijaya No.4
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jl.Sltan Trenggono No.89
21	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jl.Kyai Singkil No.42
22	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	Jl.Hadi Wijaya No.45

23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jl. Kyai Jebat No.30
24	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	Jl. Kyai Mugni No.16
25	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jl. Sultan Hadi wijaya No.35
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jl. Kyai Jebat No.30
27	SATPOL PP	Jl. Kyai Jebat No.30
28	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	Jl. Kyai Turmudzi No.1
29	Kecamatan Demak	Jl. Sultan Fatah No.16
30	Kecamatan Karangtengah	Jl. Raya Buyaran No.31
31	Kecamatan Sayung	Jl. Raya sayung Km. 10
32	Kecamatan Bonang	Jl. Raya Demak Moro
33	Kecamatan Wedung	Jl. Raya Ngawen No.44A
34	Kecamatan Mijen	Jl. Raya Mijen No.59
35	Kecamatan Wonosalam	Jl. Raya Demak–Purwodadi Km 5
36	Kecamatan Dempet	Jl. Raya Dempet No.25
37	Kecamatan Gajah	Jl. Raya Gajah No.45
38	Kecamatan Karanganyar	Jl. Raya Demak- Kudus Km 17
39	Kecamatan Kebonagung	Jl. Raya Semarang-Purwodadi Km 36
40	Kecamatan Guntur	Jl. Guntur Raya
41	Kecamatan Karangawen	Jl. Raya Karangawen Mranggen
42	Kecamatan Mranggen	Jl. Raya Mranggen No.172

Sumber : <https://demakkab.go.id/publikasi/pemerintahan>

4.2 Karakteristik Responden

4.2.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan sejumlah kuesioner kepada pegawai di SKPD yang berbentuk Dinas di Kabupaten Demak. Penelitian dilakukan pada 20 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024. Kriteria respondennya adalah Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Staf yang berkompeten dalam bidang keuangan.

Tabel 4. 2 Daftar Responden

No	Nama SKPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan	3	3
2	Dinas Pertanian Dan Pangan	3	3
3	Dinas Perumahan Dan Pemukiman	3	3
4	Dinas PU dan Tata ruang	3	3
5	Dinas Kesehatan	3	3
6	Dinas Pariwisata	3	3
7	Dinas Lingkungan Hidup	3	3
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3	3
9	Dinas Perhubungan	3	3
10	Dinas Perdagangan Dan Koperasi	3	3
11	Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	3	3
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	3
14	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3	3
15	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	3	3
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3	3
17	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	3	3
18	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3	3
JUMLAH		54	54

Dari tabel 4.2 diatas jumlah kuesioner yang disebar ke 18 dinas sejumlah 54 berhasil kembali semua. Hal ini menunjukkan bahwa semua responden melakukan pengisian.

4.2.2 Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	21	39%
Perempuan	33	61%
Jumlah	54	100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.3 berdasarkan jenis kelamin responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil responden yang berjenis kelamin laki-laki adalah 21 responden atau 39%, sedangkan responden berjenis kelamin perempuan 33 atau 61%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di Kabupaten Demak didominasi perempuan yaitu 61%.

4.2.3 Umur

Tabel 4. 4 Umur Responden

Umur	Jumlah	Presentase
20-30	28	52%
31-40	13	25%
41-50	10	18%
>50	3	5%
Jumlah	54	100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.4 berdasarkan umur responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil responden yang berumur 20-30 tahun berjumlah 28 responden atau 52%, responden berumur 31-40 berjumlah 13 atau 24%, responden berumur 41-50 berjumlah 10 atau 18%, responden berumur >50 berjumlah 3 atau 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai berumur 20-30 yaitu 52%.

4.2.4 Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5 Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Presentase
D3	5	10%
S1	49	90%
Jumlah	54	100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.5 berdasarkan pendidikan terakhir responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil responden yang pendidikan terakhirnya D3 berjumlah 5 responden atau 10%, dan responden yang pendidikan terakhirnya S1 berjumlah 49 atau 90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir S1 yaitu 90%.

4.2.5 Masa Jabatan

Tabel 4. 5 Masa Jabatan Responden

Masa Jabatan	Jumlah	Presentase
<1	2	4%
1-3	15	28%
>3	37	69%
Jumlah	54	100%

Sumber : Data Primer, 2024

Dari data karakteristik responden tabel 4.6 berdasarkan masa jabatan responden pada SKPD Kabupaten Demak diperoleh hasil responden yang masa jabatannya <1 tahun berjumlah 2 responden atau 4%, responden dengan masa jabatan 1-3 tahun berjumlah 15 atau 28%, responden dengan masa jabatan >3 tahun berjumlah 37 atau 69%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja pada SKPD berbentuk dinas di Kabupaten Demak didominasi oleh pegawai yang masa jabatannya >3 tahun yaitu 69%.

4.3 Uji Instrumen

4.3.1 Uji Validitas

Pada penelitian dilakukan uji validitas terlebih dahulu sebelum kuesioner disebar. Uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan atau pertanyaan di dalamnya mampu mengungkapkan yang akan di ukur. Untuk mengambil kesimpulan dalam uji validitas dapat r_{hitung} dengan r_{tabel} , dimana jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen yang ada kuesioner dikatakan valid, begitu pula sebaliknya.

Uji validitas dapat diukur dengan df (*degree of freedom*) dengan rumus $(df) = n - 2$, dimana n adalah jumlah sampel. Pada penelitian ini sampelnya adalah 54 responden, $(df) = 54 - 2 = 52$ taraf signifikasinya adalah 0,05 atau 5%. Maka r_{tabel} adalah sebesar 0,2681.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas

VARIABEL	PERNYA TAAN	VALIDITAS		KETERANGAN
		R Tabel	R Hitung	
Sistem Pelaporan (X1)	X1.1	0,2681	0.793	VALID
	X1.2	0,2681	0.631	VALID
	X1.3	0,2681	0.722	VALID
	X1.4	0,2681	0.636	VALID
	X1.5	0,2681	0.680	VALID
	X1.6	0,2681	0.813	VALID
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	X2.1	0,2681	0.508	VALID
	X2.2	0,2681	0.558	VALID
	X2.3	0,2681	0.666	VALID
	X2.4	0,2681	0.644	VALID
	X2.5	0,2681	0.726	VALID
Sistem Pengendalian Internal (X3)	X3.1	0,2681	0.519	VALID
	X3.2	0,2681	0.622	VALID
	X3.3	0,2681	0.570	VALID
	X3.4	0,2681	0.725	VALID
	X3.5	0,2681	0.693	VALID
	X3.6	0,2681	0.591	VALID
	X3.7	0,2681	0.500	VALID
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	X4.1	0,2681	0.824	VALID
	X4.2	0,2681	0.929	VALID
	X4.3	0,2681	0.816	VALID
	X4.4	0,2681	0.905	VALID

	X4.5	0,2681	0.837	VALID
	X4.6	0,2681	0.946	VALID
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y1	0,2681	0.720	VALID
	Y2	0,2681	0.790	VALID
	Y3	0,2681	0.703	VALID
	Y4	0,2681	0.695	VALID
	Y5	0,2681	0.806	VALID
	Y6	0,2681	0.705	VALID

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan uji validitas pada tabel 4.7 di atas hasil validitas untuk variabel Sistem Pelaporan (X1) dengan 6 instrumen pernyataan, variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) dengan 5 instrumen pernyataan, variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) dengan 7 instrumen pernyataan, variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) memiliki 6 instrumen pernyataan, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dengan 6 instrumen pernyataan terlihat bahwa semua instrumen pernyataannya valid karena nilainya di atas r_{tabel} .

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian reabel atau handal. Untuk mengambil keputusan dalam uji reliabilitas adalah dari nilai *cronbach's alpha* yaitu suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut reliabel atau konsisten.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas

VARIABEL	CRONBACH'S ALPHA	N OF ITEMS	KETERANGAN
Sistem Pelaporan (X1)	0.806	6	RELIABEL
Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)	0.605	5	RELIABEL
Sistem Pengendalian Internal (X3)	0.707	7	RELIABEL
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)	0.939	6	RELIABEL
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.831	6	RELIABEL

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

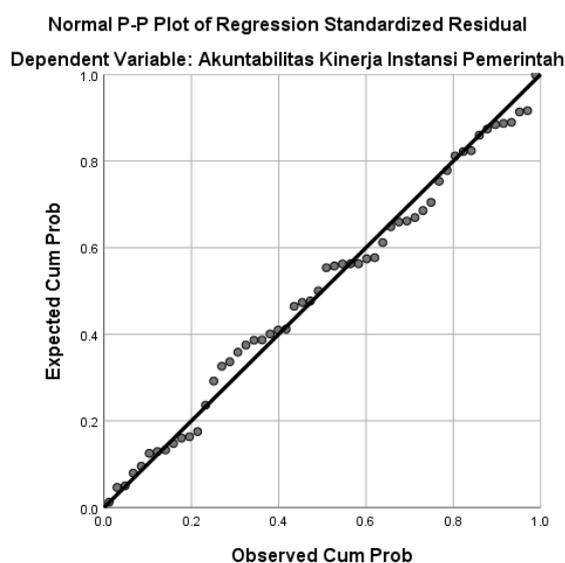
Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 4.8 di atas nilai *cronbach's alpha* dari variabel Sistem Pelaporan (X1) sebesar $0,806 > 0,60$. Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) sebesar $0.655 > 0,60$. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) sebesar $0.707 > 0,60$, variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) sebesar $0.939 > 0,60$, variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar $0.831 > 0,60$. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua instrumen reliabel.

4.4 Uji asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan uji normalitas adalah *Normality Probability Plot*, apabila titik-titik terdistribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dari gambar 4.1 hasil uji normalitas di atas titik-titik atau plot mengikuti garis diagonal yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Selain dengan *Normality Probability Plot* untuk memperoleh hasil yang lebih valid dapat menggunakan teknik uji sampel *Kolmogorof-Smirnov*. normal apabila nilai probabilitasnya $> 0,05$.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Sampel Kolmogorof-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.00378418
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.057
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dapat dilihat dari tabel 4.9 hasil uji sampel Kologorof-Smirnov, dimana nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 atau 5% dikatakan data terdistribusi dengan normal. Pada tabel di atas nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah 0.200 > 0,05, maka data di atas terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk melihat apakah antara variabel independen saling berkorelasi atau tidak. Pengujian multikolonieritas dapat dilakukan sebagai berikut:

- Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolonieritas.
- Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolonieritas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Pelaporan	.429	2.329
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.649	1.540
	Sistem Pengendalian Internal	.641	1.560
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.391	2.557

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

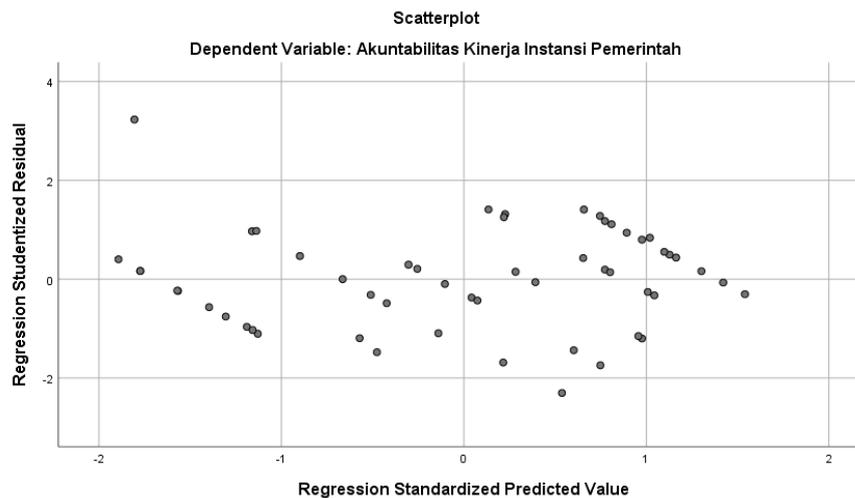
Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji Multikolinieritas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Sistem Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan VIF < 10 . Maka dapat disimpulkan data tidak memiliki gejala multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menghasilkan ketimpangan varian dari satu residu ke residu lainnya antara variabel bebas. Jika titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Dari gambar 4.2 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan bawah sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu, maka dapat dikatakan data tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Cara menentukan adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melakukan teknik uji *glejser*. Jika koefisien parameter variabel independen atau nilai signifikansinya $> 0,05$, tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.574	1.163		.494	.624
	Sistem Pelaporan	-.066	.064	-.222	-1.030	.308
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.020	.057	.061	.348	.729
	Sistem Pengendalian Internal	.034	.052	.117	.665	.509
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.019	.056	.077	.343	.733

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa Sistem Pelaporan (X1) memiliki nilai sig $0,308 > 0,05$, Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) memiliki nilai sig $0,729 > 0,05$, Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai sig $0,509 > 0,05$, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) memiliki nilai sig $0,733 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara Sistem Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). dalam penelitian ini menggunakan SPSS Versi 26 sebagai berikut :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.228	1.867		.658	.514
	Sistem Pelaporan	.629	.103	.609	6.112	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.233	.092	-.206	-2.539	.014

Sistem Pengendalian Internal	.170	.083	.168	2.058	.045
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.289	.090	.337	3.227	.002
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Hasil dari uji regresi linear berganda kemudian dimasukkan dalam persamaan berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$AKIP = 1.228 + 0.629 X_1 - 0.233 X_2 + 0.170 X_3 + 0.289 X_4$$

Keterangan :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

α = Konstanta.

X1 = Sistem Pelaporan.

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran.

X3 = Sistem Pengendalian Internal.

X4 = Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien Regresi.

e = error.

Penjelasan :

- α = nilai konstanta sebesar 1.288 memiliki arti jika variabel Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diasumsikan sama dengan nol, maka variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan mengalami kenaikan sebesar 1.288 satuan.
- β_1 = nilai koefisien regresi pada variabel sistem pelaporan sebesar 0.629, artinya saat variabel sistem pelaporan meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0.629. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,
- β_2 = nilai koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar - 0.233, artinya ketika variabel sistem pelaporan meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan menurun sebesar - 0.233. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran

anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- β_3 = nilai koefisien regresi pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 0.170, artinya ketika variabel sistem pengendalian internal meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0.170. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- β_4 = nilai koefisien regresi pada variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah sebesar 0.289, artinya ketika variabel sistem akuntansi pemerintah meningkat sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 0.289. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.4.2 Uji T

Uji t untuk mengukur seberapa pengaruh variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Kriteria uji t adalah jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat dikatakan variabel independen mempengaruhi variabel dependen atau di terima. Berikut adalah cara menghitung t_{tabel} :

$$\begin{aligned}
 T_{tabel} &= t (a/2;n-5-1) \\
 &= t (0,05/2;54-5-1) \\
 &= t (0,025;48) \\
 &= 2.010
 \end{aligned}$$

Tabel 4. 12 Hasil Koefisien

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.228	1.867		.658	.514
	Sistem Pelaporan	.629	.103	.609	6.112	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.233	.092	-.206	-2.539	.014
	Sistem Pengendalian Internal	.170	.083	.168	2.058	.045

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.289	.090	.337	3.227	.002
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah					

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji tabel 4.13 dapat diketahui bahwa ;

- 1) Pada hasil uji variabel sistem pelaporan (X1) didapat nilai t_{hitung} sebesar 6.112, dimana $6.112 > 2.010$, dengan nilai sig $0.000 < 0.05$. Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.
- 2) Pada hasil uji variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) didapat nilai t_{hitung} sebesar -2.539, dimana $-2.539 > 2.010$, dengan nilai sig $0.014 < 0.05$. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan. Namun dalam hal ini pengaruhnya adalah negatif.
- 3) Pada hasil uji variabel sistem pengendalian internal (X3) didapat nilai t_{hitung} sebesar 2.508, dimana $2.508 > 2.010$, dengan nilai sig $0.045 < 0.05$. Artinya variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.
- 4) Pada hasil uji variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (X4) didapat nilai t_{hitung} sebesar 3.227, dimana $3.227 > 2.010$, dengan nilai sig $0.002 < 0.05$. Artinya variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.

4.4.3 Uji F

Uji f dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dalam uji F yang menjadi acuannya adalah nilai signifikansinya, dimana nilai signifikansi jika $< 0,05$ dan nilia $f_{hitung} > f_{tabel}$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Berikut adalah cara mencari f_{tabel} :

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= f(k;n-k) \\
 &= f(4;54-4) \\
 &= f(4;50) \\
 &= 2.56
 \end{aligned}$$

Tabel 4. 13 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201.857	4	50.464	46.305	.000 ^b
	Residual	53.402	49	1.090		
	Total	255.259	53			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan						

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil uji f tabel 4.14 diatas didapatkan nilai f_{hitung} 46.305, dimana $46.305 > 2.56$ dan nilai sig $0.000 < 0.05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

4.4.4 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase pengaruh antara variabel independen pada variabel dependen ditandai dengan nilai adjusted R-Square

Tabel 4. 14 Hasil Uji Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.791	.774	1.04395
a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				

Sumber : Data Primer Hasil Olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 4.15 hasil uji R Square, nilai *adjusted R Square* sebesar 0.774 atau 77,4%. Artinya pada variabel sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 77,4%. Sisanya 22,6% berasal dari faktor-faktor lain.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan diperoleh variabel sistem pelaporan (X1) didapat nilai t_{hitung} sebesar 6.112, dimana $6.112 > 2.010$, dengan nilai sig $0.000 < 0.05$. Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima.

Sistem pelaporan yang baik dari suatu instansi pemerintah akan menimbulkan dampak positif terhadap akuntabilitas kerjanya. Sistem pelaporan yang baik adalah laporan yang dibuat dengan jujur, transparan, objektif, dan harus sesuai dengan SAP. Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk mengontrol kinerja manajerial dalam mengatur anggaran yang telah ditetapkan dan rencana kerja yang telah dilakukan. Sistem pelaporan yang baik akan menghasilkan *output* seperti laporan keuangan maupun kegiatan yang baik sebagai alat koreksi. Dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah bisa mengetahui program-program ataupun capaian yang telah dilakukan, meninjau dan menindaklanjuti apakah sudah sesuai dengan rencana guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Stewardship theory* menjelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan kepentingan organisasi dari pada individu, teori ini memperkirakan adanya hubungan kuat antara kesuksesan organisasi dalam mencapai visi misi dan kepuasan publik. Dalam hal ini pemerintah sebagai *Steward* yang berusaha mencapai tujuan organisasi, maka dengan sistem pelaporan yang baik pemerintah membuktikan bahwa mereka telah melakukan kegiatan dan melaporkan semua anggaran yang dilakukan dengan baik. Adanya kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan

sesuai dengan rencana strategis, berpedoman pada perjanjian kinerja dan pengukuran sesuai indikator kinerja akan tercipta sistem pelaporan yang akuntabel dan laporan yang baik. Masyarakat sebagai *principal* merasa puas dengan kinerja pemerintah yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2019) yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pendalian Akuntansi dan sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam hasil penelitiannya membuktikan sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. Dan penelitian oleh Evada Dewata, Yuliana Sari, Hadi Jauhari, Tifani Dwi Lestari (2020) yang Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menemukan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.6.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada hasil uji variabel kejelasan sasaran anggaran (X2) didapat nilai t_{hitung} sebesar -2.539, dimana $-2.539 > 2.010$, dengan nilai sig $0.014 < 0.05$. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara negatif.

Adanya kejelasan sasaran anggaran membuat akuntabilitas kinerja pemerintah menurun. hal ini terjadi karena masih ada sasaran anggaran yang belum jelas dan belum tercapai seperti apa yang sudah direncanakan. Anggaran yang diterima terkadang tidak sesuai dari dengan apa yang sudah direncanakan, penempatan anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas mengakibatkan instansi pemerintah daerah sering mengalami kesulitan dalam mengalokasikan anggaran. Pada akhir periode semua anggaran sudah harus terserap habis, namun pada kenyataannya anggaran masih banyak yang tersisa. Akibatnya instansi harus menyerap anggaran tidak sesuai dengan perencanaan dan tujuan anggaran tersebut ditetapkan. Pemerintah daerah hanya berfokus yang terpenting anggaran terserap semua, hal ini menjadikan laporan keuangan yang dibuat kurang akuntabel. Padahal anggaran untuk mereka masih banyak yang belum tepat sasaran. Pada kenyataannya masyarakat masih kekurangan dan belum puas atas kinerja pemerintah daerah.

Kejelasan sasaran anggaran berkaitan dengan anggaran yang sudah ditetapkan oleh pusat yang harus dialokasikan secara jelas. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik akan mudah dimengerti oleh yang bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan kegiatan. Setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah harus bisa diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasinya dimasa yang mendatang.

Stewardship theory dijelaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan organisasi daripada individu untuk mencapai tujuan organisasi dan kepuasan publik. Dalam hal ini pemerintah belum bisa maksimal dalam merumuskan anggarannya, sehingga yang sudah direncanakan belum bisa terlaksana dengan baik. Karakteristik individu yang bermacam-macam dari suatu organisasi seperti atasan yang ingin mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan, namun para bawahan kurang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ada pada akhirnya menyebabkan anggaran tidak sesuai dengan tujuan awal.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti, Wulan & Kurniawan (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pegawai satu dengan yang lain serta masih kurang jelasnya prioritas anggaran. Pada penelitian Kadek Fitria Dewi, Windana Putra, dan Ida Bagus Putra Astika (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Cahyani Islamiah (2021) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instansi pemerintah tidak bergantung kepada kejelasan sasaran yang telah dibuat bagian perencanaan anggaran. Sehingga adanya kejelasan sasaran anggaran, tidak dapat mempermudah instansi untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.6.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada hasil uji variabel sistem pengendalian internal (X3) didapat nilai t_{hitung} sebesar 2.508, dimana $2.508 > 2.010$, dengan nilai sig $0.045 < 0.05$. Artinya

variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima. Jadi semakin tinggi sistem pengendalian internalnya, maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang baik dan efisien adalah salah satu kunci kesuksesan pelayanan operasional yang harus diterapkan oleh pemerintah. Sistem ini sering disebut sistem pengendalian internal pemerintah, sistem ini diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana sesuai rencana dan tujuan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diperlukan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal adalah proses integral yang dilakukan oleh pegawai untuk memberi keyakinan yang cukup atas capaian kinerja yang dilakukan. Adanya sistem pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan.

Sistem pengendalian internal membantu dalam proses pengendalian yang dilakukan dalam suatu kerja instansi. Sistem pengendalian intern yang baik akan menjadi indikasi bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah sudah dilakukan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan. Dalam penelitian ini apabila dihubungkan dengan *agency teory* dimana masyarakat adalah principal dan pemerintah sebagai agen. Masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika sistem pengendalian internalnya baik maka akan didapat laporan keuangan yang andal dan terpercaya. Laporan keuangan yang baik membuktikan bahwa para pegawai pemerintah daerah melakukan tugas dengan semestinya.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Dena Handayani, Nunuy Nur Afiah, Ivan Yudianto (2020) ditemukan bahwa SPI berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan pada penelitian Pandu Haryando dan Ratih Tri Andayani (2023) menemukan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.6.4 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada hasil uji variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah (X4) didapat nilai t_{hitung} sebesar 3.227, dimana $3.227 > 2.010$, dengan nilai sig

0.002<0.05. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini didapatkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka Hipotesis diterima. Semakin baik SKPD yang ada di Kabupaten Demak menerapkan sistem akuntansi pemerintah sesuai ketentuan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintahnya.

Dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mengacu pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) jika para SKPD melakukan sesuai dengan panduan dan aturan maka akan menghasilkan *output* yang baik. Unsur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai tolok ukur pengujian dalam penelitian ini adalah pencatatan, penggolongan dan pelaporan. Dimana jika semua unsur tersebut dilakukan saat membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban maka akan menghasilkan laporan yang baik. Tujuan dari penerapan sistem akuntansi pemerintah ini agar semua SKPD tertib dalam administrasi dan pelaporan keuangannya. Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah juga untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Adanya sistem akuntansi pemerintah juga memungkinkan adanya kegiatan akuntansi yang selaras antara satu instansi satu dan lainnya, hal ini memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi daerah.

Dalam *agency teory* dijelaskan adanya pihak agen dan principal dimana terjadi asimetri informasi. Pemerintah sebagai agen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai sumberdaya yang ada. Principal dalam hal ini adalah masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atas semua aktivitas dan tujuan yang sudah diberikan kepada pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab memberikan informasi keuangan yang jelas, akurat relevan, dan tepat waktu. Dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, jelas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Masyarakat sebagai principal akan merasa bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang ada. Sehingga dapat menjadi gambaran bahwa kinerja pemerintah daerah sudah akuntabel.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Karima, Maslichah, Dwiyani Sudaryanti (2021) menemukan bahwa secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Sistem

akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan sesuai dengan ketentuan akan menimbulkan hasil yang sesuai dan baik, maka dari itu akuntabilitas kinerjanya juga akan baik. Lalu pada penelitian oleh Winda Muslimahi, Taufeni Taufik dan Rusli (2023) menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh anatar Sistem Pelaporan (X1), Kejelasan Sasaran Anggaran (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan :

1. Sistem Pelaporan (X1) didapatkan hasil nilai t_{hitung} sebesar 6.112, dimana $6.112 < 2.010$, dengan nilai sig $0.000 < 0.05$. Artinya variabel sistem pelaporan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima. Semakin tinggi sistem pelaporan, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kejelasan Sasaran Anggaran (X2) didapatkan hasil nilai t_{hitung} sebesar -2.539, dimana $-2.539 > 2.010$, dengan nilai sig $0.014 < 0.05$. Artinya variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara negatif dan signifikan, maka hipotesis ditolak. Semakin tinggi kejelasan sasaran maka semakin menurun Akuntabilitas kerjanya.
3. Sistem Pengendalian Internal (X3) didapatkan hasil nilai t_{hitung} sebesar 2.508, dimana $2.508 > 2.010$, dengan nilai sig $0.045 < 0.05$. Artinya variabel sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima. Semakin tinggi sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4) didapatkan hasil nilai t_{hitung} sebesar 3.227, dimana $3.227 > 2.010$, dengan nilai sig $0.002 < 0.05$. Artinya variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dan signifikan. Sehingga hipotesis diterima. Semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Pada uji anova atau uji f didapatkan hasil bahwa sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari banyak keterbatasan dalam penelitiannya, berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Objek yang dijadikan penelitian ini adalah satuan dinas Kabupaten Demak. SKPD di Kabupaten Demak ada 42, namun peneliti hanya mengambil 18 SKPD saja yang berbentuk dinas. Kemungkinan jika penelitian dilakukan di semua SKPD akan memperoleh hasil yang lebih maksimal.
2. Peneliti tidak bisa memastikan apakah responden mengisi kuesioner dengan sebenar-benarnya, mengingat bahwa kuesioner ditinggal dan peneliti tidak mendampingi saat pengisian.
3. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang dibutuhkan saat penelitian. Beberapa SKPD meminta waktu 1 minggu bahkan ada yang 2 minggu. Masuknya ijin penelitian pada beberapa SKPD sedikit terkendala.

5.3 Saran

Peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan. Peneliti sedikit memberi saran bagi penelitian selanjutnya agar didapatkan hasil yang lebih maksimal, antara lain :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada SKPD yang berbentuk Dinas saja. Oleh karena itu mungkin penelitian selanjutnya diharapkan bisa mencakup semua SKPD pada daerah tertentu.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 54 responden, mungkin pada penelitian selanjutnya dapat mendapatkan responden yang lebih banyak.
3. Diharapkan untuk semua SKPD di Kabupaten Demak untuk selalu meningkatkan sistem pelaporan, kejelasan sasaran anggaran, sistem pengendalian internal, dan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwor, T. C., & Akani, F. N. (2017). Financial Accountability And Performance Of Local Governments In Rivers State, Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, *V*(10), 620–635. <http://ijecm.co.uk/>
- Afrina, Dina. 2015. “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)”. *Jom Fekon*, *2*. No.2 *Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru Indonesia*.
- Agriyanto, R. (2018). Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Organisasi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *15*(1), 77–103. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.05>
- Agriyanto, R., Islam, U., & Walisongo, N. (2018). Model Rekayasa Perilaku Menggunakan Informasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *15*(1), 77–103.
- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 235–243.
- Ahmad Munawar, *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, Yogyakarta: Beta Offset, 2006.
- Ajhar, Akram, E. P. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Sap Berbasis AkruaI dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu). *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Mataram*, *3*(1), 62–73.
- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, *1*(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Alamsyah, S., Indrawan, A., & Muhammadiyah Sukabumi, U. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah. *BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, *XIX*(2).
- Annisa, V. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JOMFekom*, *4*(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>.

- Anthony, N. Robert, and Vijay Govindarajan. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 1. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Anto, H., Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah. *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, 19(2), 184. <https://doi.org/10.30651/blc.v19i2.13522>
- Anwar, Siang, I. K., & Mitrayati. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketataatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Manajemen Riset Dan Teknologi*, 4(1), 103–110.
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Ariana, R. (2016). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Perusahaan*. 1–23.
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2021). E Government And Public Satisfaction Of Bandung City Government Accountability. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 501–504.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2018). Determinant factors influencing the accountability of village financial management. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(1).
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., & Sriwijaya, P. N. (2020). Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 541–550.
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng. (2020). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. *Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah*, 09, 1–251. <http://www.dinkes.kalteng.go.id/>
- Dwipayani, N. K. S., & Hutnaleontina, P. N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas

- Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 28–47. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2281>
- Erlina, Rasdianto. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akruwal*, Medan: Brama Ardian.
- Faizal, Y. A., & Yaya, R. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Naskah Publikasi*, 1–18.
- Febrianti, T., & Indrawati Yuhertiana. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 137–146. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>
- Fitriana, R. D., Hidayati, N., & Mawardi, M. C. (2018). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 07(02), 91–103.
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 19. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.989>
- Ghozali, Imam. (2018). *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D., Yudianto, I., & Afiah, N. N. (2020). The Influence of Internal Control System, Information Technology Utilization, and Organizational Commitment on Government Accountability Performance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 17. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.26120>
- Indah Safitri, A. S. (2019). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN AUDIT KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Empiris Kabupaten Mamuju Tengah). *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 1–13. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i2.188>
- Ismail, B. (2018). Performance-Based Budgeting in Making Government Accountability Performance : Study in Government City of Makassar. *Qualitative and Quantitative Research Review*, 3(1), 221–239.
- Ilmiah, J., & Akuntansi, R. (2023). 3 1,2,3. 12(02), 657–670.

- Istiariani, I. (2018). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP (studi Kasus pada Auditor BPKP Jateng). *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(2), 2772–2785.
- Istiariani, I. (2018). Pentingnya Kecerdasan Emosi dan Spiritual terkait Isu Sensitivitas Etika Auditor (Studi Kasus pada Internal Auditor BNI Syariah). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 263–294. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2720>
- Istiariani, I. (2020). Ethic and the affecting factors: Insights from sharia accounting students. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.5037>
- Istiariani, I., & Arifah, U. (2020). Education Level, Spiritual Intelligence, and Love of Money: Do They Correlate to Ethical Perception? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.309>
- Karima, D. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Kartini, N. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang Pada Masa Pandemi Covid-19. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 197–209.
- Kewo, C. (2017). The Influence of Internal Control Implementation and Managerial Performance on Financial Accountability Local Government in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(1), 1–5. <http://www.econjournals.com>
- Keuangan, L., Kota, I., & Tahun, P. (2018). *Laporan Keuangan Inspektorat Kota Padang Tahun 2018 12*. 12–40.
- Kosadi, F., Jaya, R. C., & Hamdani, D. (2020). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 9, 77–85. <https://scholar.archive.org/work/7ymrjyowrcppaxzj3b73gbve/access/wayback/http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa/article/download/17964/pdf>
- Kinerja, L., & Pemerintah, I. (2023). *LKjIP*.
- Kivaayatul Akhyaar, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, & Wahyu Anggit Prasetya. (2022).

- Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202–217. <https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217>
- Kurniawan, A.R. (2018). PENGARUH KARAKTERISTIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. 1-20.
- Mahsun. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi *Jurnal Ekonomi, Bisnis ...*, 1(3), 1–21. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/view/67>
- Makro, I. K., Pembangunan, I., Kemiskinan, A., Pengangguran, A., Ekonomi, P., & Kapita, P. P. (2021). *Sumber data : BPS Kabupaten Kudus 2*.
- Malang, P. (2017). *Perbup APBD Malang 2017*.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Menteri, P., Republik, P., & Jakarta, D. D. I. (2017). *Peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor 16 tentang SAKIP. November*.
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Muhtar, Arifin, T., & Sutaryo. (2021). Performance accountability in Indonesian local governments: Does monitoring really work? *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1673–1692. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Mulyadi. (2014) . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Edisi Keenam. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Audtiing*, 18(1), 1–15.

- Nadila, Z., Ahyaruddin, M., & Agustiawan, A. (2021). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Perspektif Teori Institusional: Sebuah Pendekatan Penelitian Campuran. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.37859/mrabj.v2i2.2559>
- Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 30–43.
- Ningtyas, H. I. R., Roekhudin, R., & Andayani, W. (2019). The effect of government internal control system and government accounting system on performance accountability with the financial quality statements as intervening variables (Case study: The Government of Lumajang Regency, East Java). *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5), 179–187.
- Noormansyah, I., & Srikomba, H. A. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi ASN, dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 618–627.
- Nuzul Azmi, F., Yaya, R., & Tumirin. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerahdi Masa Pandemi Covid-19(Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Manajerial*, 10(2). <http://dx.doi.org/10.30587/manajerial.v10i02.4619>
- Oktaviani, S. (2020). ... MOTIVASI KERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Sin. *Juhanperak*, 484–494. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/894>
- Pebrianti, S., & Aziza, N. (2019). *Effect of Clarity of Budget Objectives, Accounting Control, Reporting Systems, Compliance with Regulation on Performance Accountability of Government Agencies*. 292, 396–410. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.62>
- Pengaruh Corporate Governance...*, Iga Sahesti, Fakultas Ekonomi UMP, 2015. (2012). 9–25.
- Pengguna, B. P. (2009). *Jda - 1 (1) (2009) Model Pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah*. 1(1), 23–30.
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444.
<https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Putri, E. W. S. (2014). Kabupaten Demak. *Jurnal Teknik Pengairan*, 2013, 1–6.
- Putri, R. P., & Halmawati, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 336–348.
<https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.565>
- Ramadhania, S., & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 807–813.
- Rangkuti, M. H. B. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. 8(2), 93–101.
- Saputra, G. R. (2022). Influence of Human Resource Competence, Internal Control System, Participation in Budget Preparation, and Accounting Control on Performance Accountability of Local Government Agencies. *Proceedings of the International Conference on Sustainable Innovation Track Accounting and Management Sciences (ICOSIAMS 2021)*, 201(Icosiams 2021), 197–203. <https://doi.org/10.2991/aeblr.k.211225.028>
- Sella, E. (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Jra*, 09(no.10), 30–46.
- Silalahi, Edipson Bayer. 2017. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai”.
- Rawung, D. T. (2020). Metode penarikan sampel. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan Pusat Statistik RI*, 22. https://pusdiklat.bps.go.id/diklat/bahan_diklat/BA_2144.pdf
- Ristina, W. (2018). Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Studi Kasus Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri Bone). *Skripsi*.
- Sadeli, Y. A. (2019). Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Permerintah Kota Makassar. *Tangible Journal*, 3(2), 169–183. <https://doi.org/10.47221/tangible.v3i2.22>
- Setiawan, D., Winarna, J., & Nugroho, Y. P. (2022). Determinants of Local Government

- Accountability. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642(Icoposdev 2021), 400–405. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.061>
- Siallagan, H. (2022). Intolerance of Ambiguity in the Behavior of Using Accrual based Accounting Information. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1), 113. <https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2699>
- Siti. (2010). *Instansi Pemerintah. 2005*, 1–12.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 184–205. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.10>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujatnika, I. N. J., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Pengaruh Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Kepemimpinan Kepala Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(2019), 378–388.
- Sumarsan. (2017). *Jurnal Akuntansi. Jurnal Akuntansi*, 51(1), 1–15.
- Syahputri, Y., Bilqis R, M. H., Dalimunthe, H., Sabrina, H., & Rahmadhani, S. N. (2019). Factors that Influence the Reality of Performance Accountability in Government Institutions (Empirical Study in Government Deli Serdang District). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(1), 263–270. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i1.178>
- Umniyah, A., Rahmiyanti, F., Anwar, K., Adhitya, F., Warno, W., Saadah, N., Zakiy, F., Lestari, H., Istiariani, I., & Ningsih, T. (2021). *The Effect of E-Filling and E-Billing Systems Implementation on Taxpayer Compliance with Understanding of the Internet as a Moderating Variable*. <https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303862>
- Utami, W. (2017). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, VOL. 2 NO. (Vol. 2 No. 4 (2017): Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)*, 56–68.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. *Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(1), 47–56.

- Yuca, H. (2022). Capsicum annum L. In *Novel Drug Targets with Traditional Herbal Medicines: Scientific and Clinical Evidence* (pp. 95–108). https://doi.org/10.1007/978-3-031-07753-1_7
- Yusuf, M. (2021). The impact of local government accounting systems and performance- based budgeting on local government performance accountability. *Jurnal Economic Resources*, 3(2), 60–68.
- Zawawi, M. (2019). Model Akuntabilitas Kinerja Skpd Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 1(1), 8–13. <https://doi.org/10.36982/jpg.v1i1.693>
- Zeyn, E. (2018). The Effect of Internal Audit Quality on Financial Accountability Quality at Local Government. *Journal of Accounting, Business and Finance Research*, 4(2), 74. <https://doi.org/10.20448/2002.42.74.82>

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner

A. Identitas Responden

Untuk validitas jawaban kuesioner dan analisis data. Maka dengan ini kami membutuhkan jawaban bapak/ibu/saudara/I sebagai responden. Dimohon untuk bersedia mengisi identitas berikut ini :

1. Nama : (Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Jabatan :
5. SKPD :
6. Pendidikan Terakhir : D3 S1/S2 S3
7. Masa Kerja : < 1 Tahun 1-3 Tahun >3Tahun

B. Petunjuk pengisian kuesioner

1. Mohon dengan hormat, bantuan dan kesediannya Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pernyataan/pertanyaan dalam kuesioner ini.
2. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Bapak/Ibu mungkin saja setuju atau tidak dengan pernyataan dibawah ini. Dalam hal ini saya ingin mengetahui seberapa jauh Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut.
3. Mohon memberi tanda *check list* (\surd) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai.
4. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban.
5. Terdapat 4 (empat) pilihan jawaban yang tersedia untuk masing-masing pernyataan, yaitu:
 1. **STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)**
 2. **TS : Tidak Setuju (Skor 2)**
 3. **S : Setuju (Skor 3)**
 4. **SS : Sangat Setuju (Skor 4)**

C. Daftar Pernyataan

1) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

NO	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
Perencanaan kinerja					
1	Renstra menjadi acuan dalam perencanaan penyusunan program				
Pengukuran kinerja					
2	Pengukuran kinerja menggunakan indikator kinerja pemerintah daerah.				
Pelaporan kinerja					
3	Pelaporan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah.				
Evaluasi internal					
4	AKIP sebagai bahan pertimbangan merencanakan program.				
Capaian kinerja					
5	Monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan secara konsisten				
6	Target dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.				

Sumber : Frika Dinasari (2021)

2) Sistem Pelaporan (X1)

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
Kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku					
1	Pelaporan Kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.				
Rencana strategis					
2	Renstra merupakan acuan dari program kegiatan.				
Perjanjian kinerja					
3	Mencantumkan Perjanjian Kinerja, target kinerja dan Indikator kinerja utama di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).				
Pengukuran kinerja					
4	Pengukuran Kinerja dilaksanakan dengan menggunakan Indikator Kinerja.				
Pengelolaan data kinerja					
5	Pengelolaan Data Kinerja telah dilaksanakan dengan baik.				

Pelaporan kinerja					
6	Laporan Kinerja Pemerintah juga bisa dilihat berdasarkan prestasi kinerja				

Sumber : Edipson Bayer Silalahi (2017)

3) Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

NO	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
Pusat Pertanggungjawaban					
1	Pada Instansi tempat saya bekerja, anggaran disusun oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban.				
Perencanaan					
2	Pada instansi tempat saya bekerja, anggaran yang disusun dapat membantu perencanaan kegiatan.				
Bidang Kegiatan					
3	Pada Instansi tempat saya bekerja anggaran yang disusun dapat digunakan untuk memonitor kinerja pusat pertanggungjawaban.				
Prioritas dan Realisasi Anggaran					
4	Pada Instansi tempat saya bekerja, dalam menetapkan anggaran telah mempertimbangkan skala prioritasnya.				
5	Pada Instansi tempat saya bekerja, jumlah anggaran yang disusun sama dengan jumlah anggaran yang direalisasikan.				

Sumber : Frika Dinasari (2021)

4) Sistem Pengendalian Internal (X3)

NO	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
Lingkungan Pengendalian					
1	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern.				
Penilaian Resiko					
2	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.				
3	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.				
Kegiatan Pengendalian					
4	Pemimpin dan seluruh pegawai memahami tujuan dari kegiatan pengendalian.				
Informasi dan Komunikasi					
5	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif.				
Pemantauan					

6	SKPD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat.				
7	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.				

Sumber : Ni Made Sudiarianti (2015)

5) Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X4)

NO	Pernyataan	STS 1	TS 2	S 3	SS 4
Pencatatan					
1	Sistem akuntansi keuangan yang diterapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.				
2	Semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis disertai dengan bukti transaksi.				
Penggolongan					
3	Mengimplementasikan empat prosedur dalam penyusunan laporan keuangan yaitu penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan selain aset.				
4	Saya mencatat bukti transaksi dan menggolongkannya ke dalam buku jurnal umum, buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan buku besar pembantu sebagai dokumen penjurnalan dan meringkas transaksi keuangan				
Pelaporan					
5	Instansi tempat saya bekerja menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010.				
6	Penyusunan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodic.				

Sumber : Rosiana (2021)

Lampiran 1. 2 Surat izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 4436 /Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023

13 Desember 2023

Hal : Izin Riset / Penelitian

Lamp. : -

Yth.

Kepala Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Kab. Demak
Cq. Kepala Bagian Tata Usaha
di Demak

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Tugas Akhir / Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZHRANI
NIM : 2005046096
Semester : VII (2023/2024)
Prodi : S.1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti : Krajan Kidul RT 06 RW 04 Banyumeneng Mranggen Demak
Tujuan Penelitian : Mencari Data dan Informasi Guna Menyelesaikan Tugas Akhir / Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN DEMAK)
Tanggal Pelaksanaan : 14 Desember 2023 – 13 Januari 2024
Lokasi Penelitian : DINPEPUSAR (Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan) Kabupaten Demak

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I Bidang Akademik
Dan Kelembagaan

NUR FATONI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA

Jl. Sultan Hadiwijoyo No.45 Demak Kode Pos : 59511
Telepon (0291) 6905626, Faximile : (0291) 6910251
<http://dinpora.demakkab.go.id> e-mail : dinporadem@gmail.com

Demak, 21 Desember 2023

Nomor : 070/1976
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan UIN Walisongo Semarang
di_
Semarang

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 4436/Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Permohonan Ijin Riset/Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHANI
NIM : 2005046096
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat : Krajan Kidul RT 06 RW 04 Banyumeneng
Mranggen Demak.

Untuk mengadakan Penelitian Skripsi di tempat kami dengan Judul "Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Demak)". pada tanggal 14 Desember 2023 s/d 13 Januari 2024.

Demikian Surat balasan ini untuk dapat di pgunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Demak
Sekretaris



Drs. SUJARWO, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19700216 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dekan UIN Walisongo Semarang;
2. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4 Demak Kode Pos 59515 Telp.(0291) 685790
Fax : 0291_ 685790 email : dirkominfo@demakkab.go.id
www.dirkominfo.demakkab.go.id

Demak, 04 Januari 2024

Nomor : 071/090
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Riset /
Penelitian

Kepada :
Yth. DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS ISLAM
UIN WALISONGO
di -

SEMARANG

Berdasarkan surat Saudara Nomor: 4436/Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Izin Riset / Penelitian, disampaikan bahwasanya Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sudah melakukan penelitian di tempat kami bekerja pada tanggal 14 Desember 2023 s/d 13 Januari 2024. Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : TSANIA NAFISA AZZAHRANI
NIP : 2005046096
Progdil : S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Demak).

Demikian untuk guna seperlunya dan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIS

INDRIJANTORO WIDODO, SE. MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19680903 199603 1 005

Tembusan:

1. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Jawa Tengah 59511, Telepon
(0291) 681075, Faksimile 0291-681075
Laman www.dinperpusar.demakkab.go.id, Pos-sel dinperpusar@demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 071/1

Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri
Walisongo Semarang Nomor : 4436/Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023
Perihal Izin Riset / Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa
mahasiswa :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHrani
NIM : 2005046096
Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan sasaran
anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengaruh
penerapan system akuntansi pemerintah (Studi Kasus
pada SKPD Kabupaten Demak)

Mahasiswa tersebut diatas benar dan telah selesai melaksanakan pengumpulan
data dan penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196807061997031008

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak ;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Sultan Fatah No. 67 Demak Kode Pos : 59511 Telp. (0291) 681075
http://www.dinperpusar.demakkab.go.id E-mail : dinperpusar@demakkab.go.id

Demak, 21 Desember 2023

Kepada :

Nomor : 423.4 / 1462

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Izin Riset / Penelitian.

Yth. Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang
di
Semarang.

Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang Nomor : 4436/Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 Perihal Izin Riset / Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Kami memberikan ijin kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHRANI
NIM : 2005046096
Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Judul Penelitian : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan sasaran anggaran, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengaruh penerapan system akuntansi pemerintah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Demak)

Untuk melaksanakan penelitian mulai tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 13 Januari 2024 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN DEMAK



AGUNG HIDAYANTO, S.Sos, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680706 199703 1 008

Tembusan: Kepada Yth ;

1. Sdr. TSANIA NAFIZA AZZAHRANI;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Kyai Mughni Nomor 1016 Demak 59511
Telepon : (0291) 681604, Faximile : (0291) 681604
<http://www.demakkab.go.id>, Email: dindagkoperdagangan@gmail.com

Nomor : 800 / 3668
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Riset/
Penelitian

Demak, 29 Desember 2023
Kepada:
Yth Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
di-
Tempat

Memperhatikan Surat dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Nomor : 4436/Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 tanggal 13 Desember
2023 perihal Permohonan Izin Riset/ Penelitian, kepada Mahasiswa :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHRANI
NIM : 2005046096
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Sistem Pelaporan, Kejelasan
Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian
Internal, Dan Pengaruh Penerapan Sistem
Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada
SKPD Kabupaten Demak)

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini
kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut kami ijin untuk
melakukan **Riset / Penelitian** di DINDAGKOP UKM Kab. Demak.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

an. KEPALA DINDAGKOP UKM
KABUPATEN DEMAK
Sekretaris


SUNTO, ST
Pembina
NIP. 197006022003121004

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516,
Telepon (0291) 685242 Faksimile : (0291) 685242, 685364
Laman: dindikbud.demakkab.go.id Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR 070/8645

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
- b. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

dengan ini menerangkan bahwa:

- a. Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHrani
- b. NIM : 2005046096
- c. Program Studi : S.1 Akuntansi Syariah
- d. Judul Skripsi : " PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN DEMAK).
- e. Waktu Penelitian : 14 Desember 2023 s/d 13 Januari 2024

Bahwa mahasiswa tersebut benar – benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mulai tanggal 14 Desember 2023 s/d 13 Januari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Demak, 22 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK



HARIS WAHYUDI RIDWAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606061995011001

Tembusan :

- 1. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan;
- 2. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Sultan Trenggono Nomor 16 Demak Kode Pos : 59571
Telpon 0291-685863 Faximile 0291-685863
http://www.demakkab.go.id e-mail : dinhub@demakkab.go.id

Nomor : 550/2815
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Ijin Riset/Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
di
Semarang.

Berdasarkan Surat dari Dekan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALI
SONGO SEMARANG Nomor 4436 /Un.10.5/D1/TA.00.01/12/2023 Tanggal 13
Desember 2023 Perihal Ijin Riset / Penelitian, bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : TSANIA NAFIZA AZZAHrani
NIM : 2005046096
Prodi : S.1 Akutansi Syariah
Alamat : Krajan Kidul RT 06 RW 04 Banyumeneng Mranggen Demak
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUTANSI PEMERINTAH
(STUDI KASUS PADA SKPD KABUPATEN DEMAK)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami dapat merima dan menyetujui sebagai
lokasi Penelitian dan mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan survei yang
dimaksud dalam surat Ijin Riset/Penelitian.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Demak, 29 Desember 2023

A.n KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIS

SUGIHARTO, SP.M.Si

Pembina Tingkat I
NIP.19691122 199603 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak
2. Arsip;

Lampiran 1. 3 Bersama Responden



Lampiran 1. 4 Tabulasi Data Penelitian

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

No	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TotalY
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	3	3	3	18
6	4	3	4	3	4	3	21
7	4	3	3	3	4	4	21
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	4	4	3	3	3	21
10	4	4	4	3	3	3	21
11	4	4	4	4	4	4	24
12	3	4	3	3	4	4	21
13	4	4	4	3	4	4	23
14	4	4	4	4	4	3	23
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	3	3	3	21
17	4	4	4	3	3	3	21
18	4	3	3	3	3	4	20
19	4	4	4	4	4	4	24
20	4	4	4	4	4	3	23
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	3	4	4	23
26	4	3	3	4	3	3	20
27	3	4	4	3	3	3	20
28	4	4	4	4	4	4	24
29	3	3	4	3	3	3	19
30	3	4	3	3	3	4	20
31	3	4	4	3	4	4	22
32	4	4	3	4	4	4	23
33	3	4	4	4	3	3	21
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	3	3	3	4	4	20
39	4	4	3	4	4	4	23
40	3	3	3	3	4	4	20
41	4	3	3	3	3	3	19
42	4	4	4	4	4	4	24

43	3	3	3	3	4	4	20
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	4	4	3	4	4	23
47	3	4	4	3	4	4	22
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	3	4	3	4	4	22
51	3	4	3	4	4	4	22
52	4	4	4	3	4	4	23
53	4	3	3	4	3	3	20
54	3	4	4	3	3	3	20

Sistem Pelaporan (X1)

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	TotalX1
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	3	4	4	23
3	3	3	4	3	3	3	19
4	3	4	4	3	3	3	20
5	3	4	3	3	3	3	19
6	4	4	3	3	4	3	21
7	3	4	4	3	4	4	22
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	4	4	4	3	3	22
10	4	4	4	3	4	3	22
11	4	3	4	4	4	4	23
12	3	4	4	3	4	4	22
13	4	4	4	3	4	4	23
14	4	4	3	3	3	3	20
15	4	3	4	4	3	4	22
16	4	3	4	3	3	3	20
17	4	4	3	4	3	3	21
18	3	4	3	3	3	4	20
19	4	4	4	4	4	4	24
20	3	4	3	4	4	3	21
21	3	4	3	3	3	3	19
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	3	4	4	4	23
25	4	4	4	4	3	4	23
26	3	3	3	4	3	3	19
27	3	4	4	3	3	3	20
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	3	3	3	4	3	20
30	4	4	4	4	3	4	23

31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	3	3	3	3	3	3	18
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	3	3	3	3	3	18
38	3	3	3	3	4	4	20
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	3	4	3	4	4	22
41	3	3	3	3	3	3	18
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	4	4	3	4	4	23
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	3	3	3	4	4	21
47	4	3	3	3	4	4	21
48	3	3	3	3	3	3	18
49	4	3	3	4	4	4	22
50	4	4	4	3	4	4	23
51	4	4	4	4	3	4	23
52	4	4	4	4	3	4	23
53	3	3	3	4	3	3	19
54	3	4	4	3	3	3	20

Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
1	3	4	4	4	3	18
2	4	4	4	3	3	18
3	3	3	3	3	3	15
4	3	4	3	3	2	15
5	3	3	4	3	3	16
6	4	3	4	2	3	16
7	4	3	3	3	3	16
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	2	14
10	4	3	3	3	3	16
11	4	3	4	4	4	19
12	4	4	3	4	2	17
13	3	4	4	2	3	16
14	3	3	3	2	2	13
15	4	3	4	4	3	18
16	3	3	3	3	2	14
17	3	3	3	4	2	15

18	3	3	3	4	3	16
19	4	4	3	4	2	17
20	3	4	4	2	2	15
21	3	3	3	3	2	14
22	3	3	3	3	2	14
23	3	4	3	3	3	16
24	3	3	3	2	4	15
25	3	4	4	4	4	19
26	4	3	4	3	4	18
27	3	4	4	3	4	18
28	4	4	4	4	4	20
29	3	4	4	3	4	18
30	3	4	4	4	4	19
31	4	4	4	4	4	20
32	4	4	4	4	4	20
33	3	3	3	3	4	16
34	4	4	2	4	3	17
35	3	3	3	3	2	14
36	3	4	4	4	4	19
37	3	3	3	3	3	15
38	4	4	4	4	3	19
39	4	4	3	4	4	19
40	4	3	4	4	4	19
41	4	3	2	3	2	14
42	4	3	4	3	4	18
43	3	3	3	4	4	17
44	3	4	4	3	2	16
45	3	3	2	3	3	14
46	3	4	4	4	2	17
47	3	4	3	3	2	15
48	4	3	4	3	2	16
49	3	3	3	4	3	16
50	4	3	3	3	3	16
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	3	3	3	3	4	16
54	3	4	4	3	4	18

Sistem Pengendalian Internal (X3)

No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	TotalX3
1	4	3	4	4	4	4	3	26
2	4	4	3	4	4	4	4	27
3	3	4	4	3	3	3	4	24
4	3	3	3	3	3	3	3	21

5	3	4	3	3	3	3	4	23
6	4	4	3	4	4	4	4	27
7	4	4	4	4	4	4	4	28
8	3	3	3	3	3	3	3	21
9	4	3	4	3	3	3	4	24
10	4	4	4	3	3	3	4	25
11	4	4	4	4	4	4	3	27
12	3	4	4	4	3	4	4	26
13	4	3	4	4	3	4	4	26
14	4	4	3	4	4	4	4	27
15	4	4	4	4	4	4	4	28
16	4	3	3	4	3	4	3	24
17	4	4	4	4	3	4	3	26
18	4	3	3	3	3	3	3	22
19	4	3	4	4	4	4	3	26
20	4	3	3	4	3	4	4	25
21	3	3	4	3	4	3	3	23
22	3	4	4	4	3	3	4	25
23	3	3	3	3	3	3	3	21
24	4	3	4	4	4	3	4	26
25	4	4	4	4	4	4	3	27
26	4	4	3	4	4	4	4	27
27	3	4	4	3	3	3	3	23
28	4	4	4	4	4	3	4	27
29	3	3	4	4	3	3	3	23
30	3	4	4	4	4	3	4	26
31	4	4	4	4	4	4	3	27
32	4	3	3	3	4	4	4	25
33	3	3	3	3	3	4	3	22
34	4	4	4	4	4	4	4	28
35	3	3	3	3	3	4	3	22
36	4	3	3	2	4	4	3	23
37	3	3	3	3	3	3	3	21
38	3	3	4	4	4	4	3	25
39	4	4	4	4	4	4	2	26
40	3	4	3	4	4	4	4	26
41	4	4	4	3	3	4	4	26
42	4	4	4	4	4	4	4	28
43	3	3	3	4	3	4	4	24
44	4	4	4	4	4	4	4	28
45	4	3	2	3	3	3	3	21
46	4	3	4	4	4	4	4	27
47	3	3	3	4	4	4	4	25
48	3	3	3	4	3	4	3	23
49	4	3	4	4	4	4	4	27
50	4	4	4	3	3	3	4	25

51	4	3	4	3	4	3	3	24
52	4	4	4	4	4	4	3	27
53	3	4	4	4	4	4	4	27
54	4	3	3	3	3	3	3	22

Penerapan Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (X4)

No	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	TotalX4
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	3	3	3	3	3	18
6	4	3	3	3	4	4	21
7	3	4	4	4	4	4	23
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	3	3	3	3	3	18
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	4	4	3	3	4	22
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	3	3	3	4	21
17	4	4	3	3	4	3	21
18	3	3	3	3	3	3	18
19	4	4	4	4	3	4	23
20	3	4	3	4	4	4	22
21	3	3	3	3	3	3	18
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	3	3	3	3	18
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	4	4	4	4	4	24
26	3	3	3	3	4	3	19
27	4	4	4	4	4	4	24
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	3	4	4	4	23
30	3	4	4	4	4	4	23
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	4	4	24
33	3	3	3	3	3	3	18
34	4	4	4	4	4	4	24
35	3	3	3	3	3	3	18
36	4	4	4	4	4	4	24
37	3	3	3	3	3	3	18

38	3	3	4	4	4	4	22
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	3	4	4	4	23
41	4	4	3	4	4	4	23
42	4	4	4	4	4	4	24
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	4	4	4	4	4	24
45	4	4	4	3	4	4	23
46	4	4	3	4	4	4	23
47	4	4	3	4	4	4	23
48	4	3	3	3	3	3	19
49	4	4	4	4	4	4	24
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	3	3	3	3	4	3	19
54	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 1.5 Hasil Pengujian

1. Hasil Uji Validitas

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

		Correlations						Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
Y1	Pearson Correlation	1	.421**	.505**	.507**	.429*	.320*	.720**
	Sig. (2-tailed)		.002	.000	.000	.001	.018	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Y2	Pearson Correlation	.421**	1	.696**	.481**	.465*	.433**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.000	.000	.001	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Y3	Pearson Correlation	.505**	.696**	1	.303*	.394*	.209	.703**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.026	.003	.129	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Y4	Pearson Correlation	.507**	.481**	.303*	1	.457*	.331*	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.026		.001	.014	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Y5	Pearson Correlation	.429**	.465**	.394**	.457**	1	.812**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003	.001		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Y6	Pearson Correlation	.320*	.433**	.209	.331*	.812*	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.129	.014	.000		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pearson Correlation	.720**	.790**	.703**	.695**	.806*	.705**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Sistem Pelaporan

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Sistem Pelaporan
X1.1	Pearson Correlation	1	.332*	.465**	.484**	.524**	.586**	.793**
	Sig. (2-tailed)		.014	.000	.000	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	.332*	1	.503**	.300*	.259	.317*	.631**
	Sig. (2-tailed)	.014		.000	.027	.059	.019	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	.465**	.503**	1	.318*	.294*	.511**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.019	.031	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	.484**	.300*	.318*	1	.191	.425**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000	.027	.019		.167	.001	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	.524**	.259	.294*	.191	1	.630**	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.059	.031	.167		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X1.6	Pearson Correlation	.586**	.317*	.511**	.425**	.630**	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	.000	.019	.000	.001	.000		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Sistem Pelaporan	Pearson Correlation	.793**	.631**	.722**	.636**	.680**	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Kejelasan Sasaran Anggaran

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kejelasan Sasaran Anggaran
X2.1	Pearson Correlation	1	.062	.166	.302*	.203	.508**
	Sig. (2-tailed)		.658	.230	.026	.142	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	.062	1	.396**	.301*	.144	.558**
	Sig. (2-tailed)	.658		.003	.027	.300	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	.166	.396**	1	.135	.393**	.666**
	Sig. (2-tailed)	.230	.003		.329	.003	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	.302*	.301*	.135	1	.278*	.644**
	Sig. (2-tailed)	.026	.027	.329		.041	.000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	.203	.144	.393**	.278*	1	.726**
	Sig. (2-tailed)	.142	.300	.003	.041		.000
	N	54	54	54	54	54	54
Kejelasan Sasaran Anggaran	Pearson Correlation	.508**	.558**	.666**	.644**	.726**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

- Sistem Pengendalian Internal

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Sistem Pengendalian Internal
X3.1	Pearson Correlation	1	.153	.179	.163	.365**	.285*	.098	.519**
	Sig. (2-tailed)		.268	.194	.240	.007	.037	.480	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	.153	1	.384**	.318*	.260	.153	.346*	.622**
	Sig. (2-tailed)	.268		.004	.019	.058	.268	.010	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	.179	.384**	1	.337*	.305*	.035	.126	.570**
	Sig. (2-tailed)	.194	.004		.013	.025	.803	.366	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	.163	.318*	.337*	1	.445**	.528**	.257	.725**
	Sig. (2-tailed)	.240	.019	.013		.001	.000	.061	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	.365**	.260	.305*	.445**	1	.442**	.136	.693**
	Sig. (2-tailed)	.007	.058	.025	.001		.001	.326	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.6	Pearson Correlation	.285*	.153	.035	.528**	.442**	1	.098	.591**
	Sig. (2-tailed)	.037	.268	.803	.000	.001		.480	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
X3.7	Pearson Correlation	.098	.346*	.126	.257	.136	.098	1	.500**
	Sig. (2-tailed)	.480	.010	.366	.061	.326	.480		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54	54
Sistem Pengendalian Internal	Pearson Correlation	.519**	.622**	.570**	.725**	.693**	.591**	.500**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

- Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah
X4.1	Pearson Correlation	1	.800**	.566**	.613**	.597**	.759**	.824**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X4.2	Pearson Correlation	.800**	1	.687**	.810**	.713**	.877**	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X4.3	Pearson Correlation	.566**	.687**	1	.710**	.577**	.734**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X4.4	Pearson Correlation	.613**	.810**	.710**	1	.773**	.853**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X4.5	Pearson Correlation	.597**	.713**	.577**	.773**	1	.750**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
X4.6	Pearson Correlation	.759**	.877**	.734**	.853**	.750**	1	.946**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	54	54	54	54	54	54	54
Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	Pearson Correlation	.824**	.929**	.816**	.905**	.837**	.946**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	54	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

- Akauntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.831	6

- Sistem Pelaporan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.806	6

- Kejelasan Sasaran Anggaran

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.605	5

- SPI

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.707	7

- Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.939	6

3. Uji Normalitas

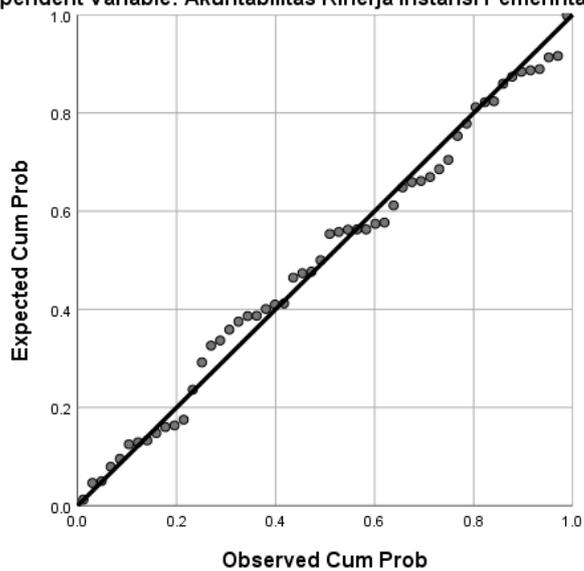
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual

N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.00378418
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.057
	Negative	-.060
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
 Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

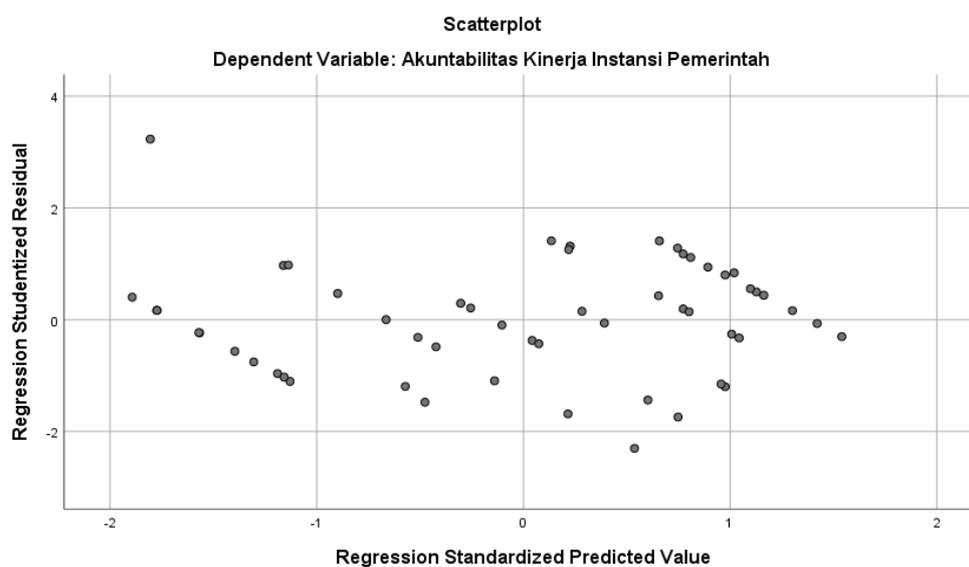


4. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	1.228	1.867		.658	.514		
	Sistem Pelaporan	.629	.103	.609	6.112	.000	.429	2.329
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.233	.092	-.206	-2.539	.014	.649	1.540
	Sistem Pengendalian Internal	.170	.083	.168	2.058	.045	.641	1.560
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.289	.090	.337	3.227	.002	.391	2.557

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Uji Heteroskedastisitas



		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.574	1.163		.494	.624
	Sistem Pelaporan	-.066	.064	-.222	-1.030	.308
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.020	.057	.061	.348	.729
	Sistem Pengendalian Internal	.034	.052	.117	.665	.509
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.019	.056	.077	.343	.733

a. Dependent Variable: ABS_RESIDUAL

6. Uji Anova (F)

		ANOVA^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	201.857	4	50.464	46.305	.000 ^b
	Residual	53.402	49	1.090		
	Total	255.259	53			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

7. Uji T

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.228	1.867		.658	.514
	Sistem Pelaporan	.629	.103	.609	6.112	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.233	.092	-.206	-2.539	.014
	Sistem Pengendalian Internal	.170	.083	.168	2.058	.045
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.289	.090	.337	3.227	.002

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.889 ^a	.791	.774	1.04395

a. Predictors: (Constant), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Pelaporan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

9. Uji regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.228	1.867		.658	.514
	Sistem Pelaporan	.629	.103	.609	6.112	.000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	-.233	.092	-.206	-2.539	.014
	Sistem Pengendalian Internal	.170	.083	.168	2.058	.045
	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah	.289	.090	.337	3.227	.002

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Tsania Nafiza Azzahrani
Tempat/Tanggal Lahir : Demak/ 15 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Krajan kidul Rt 06 Rw 04 Desa Banyumeneng Kec.
Mranggen Kabupaten Demak
No telepon : 0895391953762
Email : tsanianafiza15@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- 1 SDN 2 Banyumeneng (2008-2014).
- 2 SMP Negeri 2 Mranggen (2014-2017).
- 3 MAN 1 Kota Semarang (2017-2020).
- 4 UIN Walisongo Semarang (2020-sekarang).

C. Pengalaman Organisasi

- 1 UKM Kobi UIN Walisongo Semarang 2020-2021.
- 2 HMJ Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang 2022.